

***SALINAN***

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

***SALINAN***

**PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 1158 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 459 ayat (7) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar perlu dilakukan penjabaran tugas dan fungsi Kelompok Sub-substansi dalam pelaksanaan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan tugas Koordinator dan Sub-koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

b. bahwa pelaksanaan tugas Koordinator dan Sub-koordinator sebagai pelaksana fungsi pelayanan teknis fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan pimpinan Tinggi Pratama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Polewali Mandar tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-substansi dan Tugas Koordinator dan Sub-koordinator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan tugas dan fungsi Kelompok Sub-substansi dan tugas Koordinator dan Sub-koordinator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercanum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Kelompok Sub-substansi sebagai pedoman pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

KETIGA : Untuk menjalankan tugas Kelompok Sub-substansi di Lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu ditunjuk Sub-koordinator yang dikoordinir oleh Koordinator.

KEEMPAT : Koordinator dan Sub-koordinator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

KELIMA : Dalam hal tidak dilaksanakan Penyetaraan Jabatan pada jenjang Jabatan Administrator maka fungsi Koordinator dilaksanakan oleh Pejabat Administrator di atas Sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali

pada tanggal 30 Desember 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 30 Desember 2021

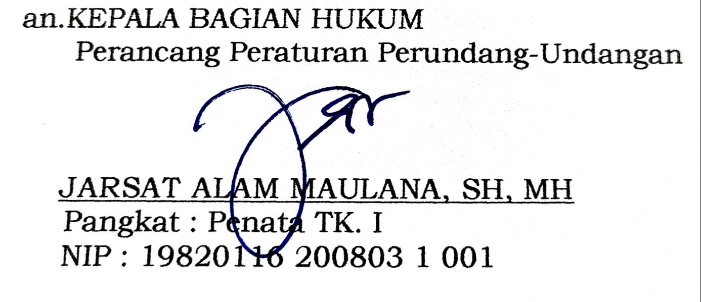
an.KEPALA BAGIAN HUKUM

Perancang Peraturan Perundang-Undangan

**JARSAT ALAM MAULANA, SH, MH**

Pangkat: Penata TK. I

NIP : 19820116 200803 1 001



Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 2022

an.KEPALA BAGIAN HUKUM

Perancang Peraturan Perundang-Undangan

**JARSAT ALAM MAULANA, SH, MH**

Pangkat: Penata TK. I

NIP : 19820116 200803 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 1158 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

**BAB I**

**TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUB-SUBSTANSI**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**I. SEKRETARIAT DAERAH**

1. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**
2. **Bagian Tata Pemerintahan**

Bagian Tata Pemerintahan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

1.1 Kelompok Sub-substansi Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pemerintahan dan kerja sama.

Kelompok Sub-substansi Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama;
3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. pelaksanaan fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
5. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Kelompok Sub-substansi Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan administrasi kewilayahan.

Kelompok Sub-substansi Administrasi Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
2. pelaksanaan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, desa, kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;
3. pelaksanaan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
4. penyiapan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
5. penyusunan bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat;
6. penyusunan bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Kelompok Sub-substansi Otonomi Daerah mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan otonomi daerah.

Kelompok Sub-substansi Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi :

* 1. penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  2. menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
  3. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah;
  4. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  5. pelaksanaan fasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  6. penyusunan bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah;
  7. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum;
  8. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;
  9. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang otonomi daerah; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2. Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Bagian Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-substansi Bina Mental Spiritual mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan bina mental spiritual.

Kelompok Sub-substansi Bina Mental Spiritual menyelenggarakan fungsi :

* + - * 1. penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
        2. penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan;
        3. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
        4. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
        5. penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
        6. penyiapan bahan, pengoordinasian dan melakukan perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
        7. penyiapan dan pengoordinasian bahan pedoman pembinaan Lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
        8. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
        9. penyiapan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan kerja sama antar lembaga keagamaan;
        10. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja sama antar lembaga keagamaan;
        11. pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga keagamaan;
        12. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan musyawarah antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
        13. penyiapan bahan dan pengoordinasian kegiatan forum kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
        14. pelaksanaan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
        15. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;
        16. penyiapan bahan, dan pengendalian pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan; dan
        17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan kesejahteraan sosial.

Kelompok Sub-substansi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

* 1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan, sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan, sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  3. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan, sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  4. penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  5. penyiapan bahan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat;
  6. penyiapan bahan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi;
  7. penyiapan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi perpindahan transmigrasi;
  8. pelaksanaan seleksi dan pelatihan calon transmigran;
  9. pelaksanaan pemberangkatan dan pengawalan calon transmigran dari daerah asal ke transito Kabupaten, Provinsi dan lokasi transmigrasi;
  10. penyiapan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga;
  11. penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga; dan
  12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Kelompok Sub-substansi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan kesejahteraan masyarakat.

Kelompok Sub-substansi Kesejahteraan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :

* 1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
  3. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
  4. penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan kemasyarakatan lainnya; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bagian Hukum**

Bagian Hukum mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

3.1 Kelompok Sub-substansi Perundang-Undangan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan perundang-undangan.

Kelompok Sub-substansi Perundang-Undangan, menyelenggarakan fungsi :

* 1. penyiapan bahan penyusunan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan harmonisasi, sinkronisasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan penjelasan Kepala Daerah dalam proses penetapan Peraturan Daerah;
  4. penyiapan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah;
  5. pelaksanaan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah;
  6. penyiapan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum daerah;
  7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-substansi Bantuan Hukum mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bantuan hukum.

Kelompok Sub-substansi Bantuan Hukum, menyelenggarakan fungsi :

* 1. pelaksanaan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  2. pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
  3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara hukum;
  4. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
  5. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion);
  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketa hukum; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Kelompok Sub-substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan dokumentasi dan informasi hukum.

Kelompok Sub-substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum, menyelenggarakan fungsi :

* 1. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  2. penghimpunan serta pengolahan data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah;
  3. pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  4. pemberian pelayanan administrasi informasi produk hukum;
  5. pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum daerah; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. **Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

**1. Bagian Administrasi Pembangunan**

Bagian Administrasi Pembangunan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

1.1 Kelompok Sub-substansi Penyusunan Program mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan penyusunan program.

Kelompok Sub-substansi Penyusunan Program, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan dan persiapan rencana kegiatan penyusunan program pembangunan daerah;
2. penyusunan bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program pembangunan daerah;
3. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan program pembangunan daerah;
4. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan sinergitas program pembangunan daerah;
5. pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan daerah;
6. pelaksanaan penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan daerah;
7. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah;
8. pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Kelompok Sub-substansi Pengendalian Program mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pengendalian program.

Kelompok Sub-substansi Pengendalian Program, menyelenggarakan fungsi :

* 1. penyusunan rencana kegiatan pengendalian program pembangunan;
  2. penyusunan bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar pembangunan sesuai dengan program pembangunan daerah;
  3. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan daerah;
  4. pelaksanaan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan program pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta;
  5. pengendalian sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta;
  6. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pembangunan; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Kelompok Sub-substansi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan evaluasi dan pelaporan.

Kelompok Sub-substansi Evaluasi dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi :

* 1. penyusunan rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah;
  2. pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
  3. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
  4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
  5. pencatatan, penyusunan rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
  6. pengolahan dan penyajian data hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
  7. penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan program pembangunan daerah; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
     + 1. **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

2.1 Kelompok Sub-substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

Kelompok Sub-substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi :

* 1. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
  2. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
  3. pelaksanaan fasilitasi, registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
  4. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
  5. pelaksanaan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
  6. pelaksanaan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
  7. pengelolaan informasi kontrak;
  8. pengelolaan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Kelompok Sub-substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

* 1. pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
  2. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
  3. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
  4. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
  5. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
  6. penyusunan dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;
  7. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
  8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Kelompok Sub-substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Kelompok Sub-substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

* 1. pelaksanaan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
  2. pelaksanaan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
  3. membina hubungan dengan para pemangku kepentingan;
  4. pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
  5. pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
  6. pengelolaan personil UKPBJ;
  7. pelaksanaan pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;
  8. pelaksanaan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
  9. pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
  10. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
  11. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;
  12. pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; dan
  13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
      + 1. **Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

3.1 Kelompok Sub-substansi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah dan energi sumber daya mineral.

Kelompok Sub-substansi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral, menyelenggarakan fungsi :

* 1. penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM;
  2. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM;
  3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM;
  4. penyusunan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM;
  5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM;
  6. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-substansi Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, dan pertambangan.

Kelompok Sub-substansi Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

* 1. penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, dan pertambangan;
  2. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, dan pertambangan;
  3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, dan pertambangan;
  4. penyusunan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, dan pertambangan;
  5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, dan pertambangan;
  6. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, dan pertambangan; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Kelompok Sub-substansi Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan dan Badan Usaha Daerah mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pendapatan, penanaman modal, perijinan dan Badan Usaha Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

Kelompok Sub-substansi Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan dan Badan Usaha Daerah, menyelenggarakan fungsi :

* 1. penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan dan Badan Usaha Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
  2. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan dan Badan Usaha Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
  3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan dan Badan Usaha Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
  4. penyusunan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan dan Badan Usaha Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
  5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan dan Badan Usaha Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
  6. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan dan Badan Usaha Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**C. Asisten Administrasi Umum**

**1. Bagian Organisasi**

Bagian Organisasi mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

1.1 Kelompok Sub-substansi Kelembagaan dan Analisa Jabatan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penataan kelembagaan dan analisa jabatan.

Kelompok Sub-substansi Kelembagaan dan Analisa Jabatan, menyelenggarakan fungsi :

* 1. penyiapan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);
  2. penyusunan bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan organisasi Perangkat Daerah;
  3. penyusunan bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  4. penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
  5. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
  6. penyusunan kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi Perangkat Daerah;
  7. penyusunan profil kelembagaan Perangkat Daerah; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Kelompok Sub-substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan publik dan penataan ketatalaksanaan.

Kelompok Sub-substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, menyelenggarakan fungsi :

* 1. penyusunan pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja;
  2. penyiapan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  3. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik ;
  4. penghimpunan dan fasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah;
  5. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
  6. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Kelompok Sub-substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kinerja dan reformasi birokrasi.

Kelompok Sub-substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
2. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten;
3. penyusunan road map reformasi birokrasi;
4. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

2.1 Kelompok Sub-substansi Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan komunikasi dan dokumentasi pimpinan.

Kelompok Sub-substansi Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan, menyelenggarakan fungsi :

* 1. penguatan hubungan komunikasi dan informasi dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
  2. pemberian masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
  3. pemberian informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan;
  4. penghimpunan dan pengolahan informasi yang yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  5. penyiapan dan menggandakan bahan materi rapat;
  6. penyiapan dan menggandakan bahan materi kebijakan; dan
  7. penyusunan naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  8. pendokumentasian kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  9. penyusunan notulensi rapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  10. pelaksanaan fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Upacara mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan upacara.

Kelompok Sub-substansi Upacara, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Upacara;
2. penyusunan rencana kerja operasional pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan Upacara;
3. pengendalian penyusunan kebijakan upacara peringatan hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan;
4. pengendalian pelaksanaan upacara peringatan hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan;
5. pengendalian penyiapan kelengkapan dan peralatan upacara peringatan hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan;
6. pengendalian penyiapan dan pemberdayaan perangkat upacara peringatan hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan;
7. pengendalian pelaksanaan koordinasi pelaksanaan upacara peringatan hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upacara peringatan hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bagian Umum**

Bagian Umum mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

3.1 Kelompok Sub-substansi Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan dan staf ahli, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Kelompok Sub-substansi Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli, menyelenggarakan fungsi :

* + - 1. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan Tata Usaha Umum, Persuratan, Kepegawaian dan Rapat-Rapat Dinas;
      2. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
      3. penyiapan bahan penyusunan perencanaan Sekretariat Daerah yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja) tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA);
      4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan Verifikasi RKA, DPA, DPPA Perangkat Daerah;
      5. penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah;
      6. pelaksanaan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah;
      7. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah;
      8. pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah;
      9. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah;
      10. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
      11. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah;
      12. penyusunan bahan Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
      13. penyusunan bahan laporan SPIP;
      14. penyusunan bahan laporan keuangan Sekretariat Daerah;
      15. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan Tata Usaha Umum, Persuratan, Kepegawaian, dan Rapat-Rapat Dinas;
      16. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
      17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-substansi Rumah Tangga mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan kerumahtanggaan dan pengelolaan rumah tangga pemerintah daerah.

Kelompok Sub-substansi Rumah Tangga, menyelenggarakan fungsi:

* 1. pelaksanaan urusan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat daerah;
  2. pelaksanaan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat-rapat; dan
  3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Kelompok Sub-substansi Perlengkapan dan Pemeliharaan mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan.

Kelompok Sub-substansi Perlengkapan dan Pemeliharaan, menyelenggarakan fungsi :

* 1. pelaksanaan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat daerah;
  2. pelaksanaan kebijakan pengadaan perlengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat daerah;
  3. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Daerah dan Wakil serta Sekretariat daerah serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan;
  4. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Daerah dan Wakil serta Rumah Dinas Sekretariat daerah;
  5. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat daerah; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**II. SEKRETARIAT DPRD**

1. **Bagian Umum**

Bagian Umum mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

1.1 Kelompok Sub-subtansi Rumah Tangga mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan kerumahtanggaan dan pengelolaan rumah tangga Sekretariat DPRD.

Kelompok Sub-subtansi Rumah Tangga, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan kerumahtanggaan dan pengelolaan rumah tangga Seretariat DPRD;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan kerumahtanggaan dan pengelolaan rumah tangga Seretariat DPRD;
3. pengendalian urusan rumah tangga Pimpinan DPRD serta Sekretariat DPRD;
4. pengendalian penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan dan rapat-rapat;
5. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan rumah tangga Seretariat DPRD;
6. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengendalian pelaksanaan koordinasi, penyusunan kebijakan kerumahtanggaan dan pengelolaan rumah tangga Seretariat DPRD; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Kelompok Sub-subtansi Perlengkapan mempunyai tugas mengendalikan administrasi dan fasilitasi perlengkapan Sekretariat DPRD.

Kelompok Sub-subtansi Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis administrasi dan fasilitasi perlengkapan Sekretariat DPRD;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitasi perlengkapan Sekretariat DPRD;
3. pengendalian administrasi dan fasilitasi perlengkapan gedung kantor;
4. pengendalian administrasi dan fasilitasi peralatan gedung kantor
5. pengendalian administrasi dan fasilitasi pemeliharaan gedung kantor;
6. pengendalian administrasi dan fasilitasi perlengkapan rumah tangga Sekretariat DPRD;
7. pengendalian administrasi dan fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas;
8. pengendalian administrasi dan fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor;
9. pengendalian administrasi dan fasilitasi pengelolaan aset;
10. pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitasi perlengkapan Sekretariat DPRD;
11. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi dan fasilitasi perlengkapan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2. Bagian Risalah dan Persidangan**

Bagian Risalah dan Persidangan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-subtansi Risalah dan Persidangan mempunyai tugas mengendalikan administrasi dan fasilitasi risalah dan persidangan DPRD.

Kelompok Sub-subtansi Risalah dan Persidangan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis administrasi dan fasilitasi risalah dan persidangan DPRD;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitasi risalah dan persidangan DPRD;
3. Pengendalian kelengkapan administrasi persidangan;
4. Pengendalian penyusunan risalah hasil persidangan;
5. pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitasi risalah dan persidangan DPRD;
6. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan risalah dan persidangan DPRD; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-subtansi Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas mengendalikan administrasi dan fasilitasi hukum dan perundang-undangan DPRD.

Kelompok Sub-subtansi Hukum dan Perundang-undangan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis administrasi dan fasilitasi hukum dan perundang-undangan DPRD;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitasi hukum dan perundang-undangan DPRD;
3. Pengendalian administrasi dan fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah inisiatif DPRD;
4. Pengendalian administrasi dan fasilitasi legislasi daerah;
5. Pengendalian administrasi dan fasilitasi pembentukan produk hukum DPRD yang berupa Peraturan Daerah, keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
6. Pengendalian administrasi dan fasilitasi sosialisasi produk hukum oleh DPRD;
7. pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitasi hukum dan perundang-undangan DPRD;
8. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan hukum dan perundang-undangan DPRD; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3Kelompok Sub-subtansi Perpustakaan mempunyai tugas mengendalikan administrasi dan fasilitasi Perpustakaan DPRD.

Kelompok Sub-subtansi Perpustakaan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis administrasi dan fasilitasi perpustakaan DPRD;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitasi perpustakaan DPRD;
3. pengendalian administrasi dan fasilitasi dokumentasi produk hukum DPRD berupa Peraturan Daerah, keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
4. pengendalian administrasi dan fasilitasi perpustakaan DPRD;
5. pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitasi perpustakaan DPRD;
6. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan perpustakaan DPRD; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bagian Keuangan**

Bagian Keuangan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

3.1 Kelompok Sub-subtansi Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas mengendalikan administrasi dan fasilitasi perencanaan program dan anggaran DPRD.

Kelompok Sub-subtansi Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis administrasi dan fasilitasi perencanaan dan anggaran DPRD;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitasi perencanaan dan anggaran DPRD;
3. pengendalian penyusunan rencana strategis;
4. pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
5. pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
6. pengendalian penyusunan perjanjian kinerja seluruh unit satuan kerja;
7. pengendalian pengukuran kinerja seluruh unit satuan kerja;
8. pengendalian pelaporan akuntabilitas kinerja;
9. pengendalian pelaporan capaian Program dan Kegiatan Satuan kerja;
10. pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitasi perencanaan program dan anggaran DPRD;
11. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan perencanaan program dan anggaran DPRD; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-subtansi Perbendaharaan mempunyai tugas mengendalikan administrasi dan fasilitasi perbendaharaan DPRD.

Kelompok Sub-subtansi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis administrasi dan fasilitasi perbendaharaan DPRD;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitasi perbendaharaan DPRD;
3. pengendalian administrasi keuangan;
4. pengendalian administrasi perbendaharaan;
5. pengendalian administrasi gaji dan tunjangan;
6. pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitasi Perbendaharaan DPRD;
7. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan Perbendaharaan DPRD; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Kelompok Sub-subtansi Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan administrasi dan fasilitasi verifikasi, akuntansi dan pelaporan DPRD.

Kelompok Sub-subtansi Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis administrasi dan fasilitasi verifikasi, akuntansi dan pelaporan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitasi verifikasi, akuntansi dan pelaporan;
3. pengendalian administrasi verifikasi;
4. pengendalian administrasi akuntansi;
5. pengendalian administrasi pelaporan keuangan berkala, semesteran dan tahunan;
6. pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitasi verifikasi, akuntansi dan pelaporan;
7. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan verifikasi, akuntansi dan pelaporan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

**4. Bagian Hubungan Masyarakat**

Bagian Hubungan Masyarakatmengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

4.1 Kelompok Sub-subtansi Reses dan Aspirasi mempunyai tugas mengendalikan administrasi dan fasilitasi reses DPRD serta administrasi dan fasilitasi pengelolaan aspirasi masyarakat kepada DPRD.

Kelompok Sub-subtansi Reses dan Aspirasi, menyelenggarakan fungsi:

1. pengendalian penyiapan bahan Reses DPRD;
2. pengendalian administrasi dan fasilitasi pelaksanaan Reses DPRD;
3. pengendalian administrasi dan fasilitasi penerimaan aspirasi masyarakat kepada DPRD;
4. pengendalian administrasi dan fasilitasi laporan hasil Reses DPRD;
5. pengendalian administrasi dan fasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD;
6. pengendalian dokumentasi tindak lanjut aspirasi masyarakat kepada DPRD;
7. pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitasi reses DPRD;
8. pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitasi pengelolaan aspirasi masyarakat kepada DPRD;
9. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi dan fasilitasi reses DPRD serta administrasi dan fasilitasi pengelolaan aspirasi masyarakat kepada DPRD; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Kelompok Sub-subtansi Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas mengendalikan administrasi dan fasilitasi hubungan masyarakat dan keprotokolan DPRD.

Kelompok Sub-subtansi Hubungan Masyarakat dan Protokol, menyelenggarakan fungsi :

1. pengendalian administrasi dan fasilitasi hubungan masyarakat DPRD;
2. pengendalian administrasi dan fasilitasi keprotokolan Pimpinan dan anggota DPRD;
3. pengendalian administrasi dan fasilitasi acara dan agenda kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD;
4. pengendalian administrasi dan fasilitasi pelayanan tamu-tamu Pimpinan dan anggota DPRD;
5. pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitasi keprotokolan DPRD;
6. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi dan fasilitasi hubungan masyarakat dan keprotokolan DPRD; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Kelompok Sub-subtansi Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas mengendalikan administrasi dan fasilitasi dokumentasi dan publikasi.

Kelompok Sub-subtansi Dokumentasi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi :

1. pengendalian administrasi dan fasilitasi dokumentasi kegiatan dewan;
2. pengendalian administrasi dan fasilitasi publikasi data dan informasi dewan;
3. pengendalian pengelolaan website dan sistem informasi dewan;
4. pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitasi dokumentasi dan publikasi;
5. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi dan fasilitasi dokumentasi dan publikasi; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

**III. INSPEKTORAT DAERAH**

1. **Sekretariat**

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

1.1 Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan pelaporan Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

* 1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
  2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
  3. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
  4. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
  5. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
  6. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
  7. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
  8. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
  9. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan Inspektorat; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
3. pengendalian administrasi keuangan;
4. pengendalian perbendaharaan;
5. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
6. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
7. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi;dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

**IV. DINAS KESEHATAN**

1. **Sekretariat**

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

* 1. Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
3. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
4. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
5. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
6. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
7. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
8. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
9. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
11. **Bidang Bina Kesehatan Masyarakat**

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

* 1. Kelompok Sub-substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembinaan kesehatan keluarga dan gizi.

Kelompok Sub-substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pembinaan kesehatan keluarga dan gizi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan kesehatan keluarga dan gizi;
3. pengendalian pembinaan kesehatan ibu-anak;
4. pengendalian pembinaan kesehatan usia lanjut;
5. pengendalian pembinaan kelangsungan hidup dan kesehatan maternal, neonatal dan balita;
6. pengendalian pembinaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja di dalam dan diluar sekolah;
7. pengendalian pembinaan kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan lanjut usia;
8. pengendalian pembinaan dan fasilitasi standar pelayanan kebidanan (asuhan persalinan normal) dan standar pelayanan kontrasepsi;
9. pengendalian pembinaan penanganan komplikasi maternal dan neonatal;
10. pengendalian pembinaan pencegahan kehamilan yang tak diinginkan dan asuhan pasca keguguran,
11. pengendalian pembinaan Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar) dan rumah sakit PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Komprehensif);
12. pengendalian pembinaan dan fasilitasi penerapan buku KIA, penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM), pelatihan/penyegaran kembali Stimulasi Intervensi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (SIDDTK);
13. pengendalian pembinaan, fasilitasi dan pelayanan kesehatan deteksi dini kanker mulut rahim dan kanker payudara, kemudian pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA);
14. pengendalian penyusunan kebutuhan bahan pangan, peralatan dan sarana obat gizi serta operasional kegiatan program gizi;
15. pengendalian pembinaan kewaspadaan dan ketahanan gizi, penangulangan masalah gizi makro dan mikro;
16. pengendalian pembinaan pengelolaan konsumsi gizi umum dan khusus;
17. pengendalian pembinaan dan fasilitasi peningkatan gizi masyarakat pada kelompok sasaran (balita, remaja, usia subur, bumil, busui dan usia lanjut) yang terintregasi dengan program Kesehatan Keluarga;
18. pembinaan dan fasilitasi pelayanan gizi di posyandu dalam rangka meningkatkan ketrampilan kader bekerjasama dengan lintas program dan sektor terkait;
19. pengendalian pembinaan pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS);
20. pengendalian pembinaan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi);
21. pembinaan dan fasilitasi pemantauan Status Gizi (PSG) masyarakat, pencegahan dan penanggulangan gizi buruk, pencegahan dan penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI), pencegahan dan penanggulangan anemia gizi besi, pencegahan dan penanggulangan kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya;
22. pengendalian pembinaan dan fasilitasi pelayanan gizi institusi;
23. pengendalian pemetaan daerah rawan gizi dan keluarga sadar gizi;
24. pengendalian pembinaan, pengawasan dan evaluasi Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS);
25. pengendalian penguatan kinerja Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Tim Pangan dan Gizi (TPG), Pokja Penanggulangan Gizi Buruk dan Pokja Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI);
26. pengendalian koordinasi teknis pembinaan kesehatan keluarga dan gizi;
27. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan kesehatan keluarga dan gizi; dan
28. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengendalikan mengendalikan pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat.

Kelompok Sub-substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis promosi dan pemberdayaan masyarakat;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
3. pengendalian pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan;
4. pengendalian pelaksanaan advokasi dan kemitraan lintas sektor, klinik, dan rumah sakit;
5. pengendalian pembangunan dan pemeliharaan fasilitas UKBM;
6. pengendalian penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana promosi Kesehatan, serta sarana dan prasarana UKBM;
7. pengendalian pelaksanaan promosi kesehatan melalui media cetak dan elektonik;
8. pengendalian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang meliputi desa siaga, posyandu, taman posyandu, poskesdes, poskestren, polindes, saka bakti husada (SBH), usaha kesehatan sekolah (UKS) pembinaan kader kesehatan dan kelompok potensial lainnya;
9. pengendalian koordinasi teknis promosi dan pemberdayaan masyarakat;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Kelompok Sub-substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembinaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Kelompok Sub-substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembinaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
3. pengendalian pelatihan bagi petugas kesehatan lingkungan (kesling), kader kesling dan petugas kesehatan kerja dan olah raga;
4. pengendalian pembinaan kesehatan lingkungan dan permukiman, kebersihan kegiatan usaha pariwisata, pasar, terminal, Rumah Sakit dan sarana umum lainnya;
5. pengendalian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyehatan air dan sanitasi dasar;
6. Pengendalian pembinaan surveilans dan pengawasan pemeriksaan kualitas air termasuk pada pengambilan dan pengiriman sampel air ke laboratorium;
7. pengendalian pembinaan, pengawasan, pengambilan, dan pemeriksaan sampel makanan dan minuman serta bahan pangan;
8. pengendalian pembinaan, pengawasan dan perlindungan hygiene dan sanitasi pangan;
9. pengendalian pembinaan penyehatan udara, tanah dan kawasan;
10. pengendalian pembinaan pengamanan limbah dan radiasi;
11. pengendalian pembinaan sanitasi darurat daerah bencana dan rest area pada situasi mudik hari raya;
12. pengendalian pembinaan kesehatan okupasi, pekerja dan lingkungan kerja;
13. pengendalian pelaksanaan pembinaan sanitasi industri makanan dan minuman, depot air minum isi ulang, air minum dalam kemasan, hotel, restoran dan rumah makan serta yang berhubungan dengan tempat-tempat umum dan sarana penyediaan air bersih;
14. pengendalian pembinaan penyehatan perumahan, penyehatan sampah dan/atau limbah rumah tangga (limbah domestik), sarana air bersih dan survei jentik;
15. pengendalian pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap penjual dan pengguna pestisida dan pengelolaan TPS dan TPA, serta pemantauan dan penanggulangan penyakit berbasis lingkungan melalui klinik sanitasi;
16. pengendalian pembinaan pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) pada kelompok formal dan non formal;
17. pengendalian pembinaan kesehatan kerja dan keselamatan kerja;
18. pengendalian pembinaan penyelenggaraan kesehatan kerja dasar;
19. pengendalian pembinaan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat;
20. pengendalian pelaksanaan tes kebugaran pada jamaah haji;
21. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pembinaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
22. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
23. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

3.1 Kelompok Sub-substansi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan surveilans dan imunisasi.

Kelompok Sub-substansi Surveilans dan Imunisasi, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan surveilans dan imunisasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan surveilans dan imunisasi;
3. pengendalian pelaksanaan imunisasi terhadap bayi, balita, anak sekolah, dan Wanita Usia Subur (WUS) untuk memberikan perlindungan terhadap Penularan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I);
4. pengendalian pengamatan penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM);
5. pengendalian penyiapan kecukupan persediaan vaksin dan bahan bundling untuk Puskesmas dan unitpelayanan kesehatan swasta yang melakukan imunisasi;
6. pengendalian pembinaan tentang pencegahan penyakit, pengamatan penyakit menular dan tidak menular serta terhadap Penyakit Menular Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah penyakit;
7. pengendalian pengamatan epidemiologi terhadap penyakit menular terpilih dan penyakit tidak menular terpilih untuk mengetahui sebab-sebabnya serta kemungkinan mengarah pada kejadian luar biasa atau wabah penyakit serta tanda-tanda adanya kejadian luar biasa atau wabah penyakit maupun peristiwa yang bersifat massal di semua matra baik darat, laut maupun udara;
8. fasilitasi pemeriksaan kesehatan dan imunisasi terhadap calon jamaah haji serta pengamatan terhadap jamaah haji sepulang dari tanah suci;
9. pengendalian koordinasi teknis surveilans dan imunisasi;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan surveilans dan imunisasi; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Kelompok Sub-substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
3. pengendalian penyakit menular langsung (IMS, HIV/AIDS, TBC, Kusta, ISPA, Diare, Frambusia, dll);
4. pengendalian penyakit bersumber binatang (demam berdarah, chikungunya, malaria, filariasis, leptospirosis, dll);
5. pengendalian penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah penyakit;
6. pengendalian penyiapan kebutuhan sarana dan operasional kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah penyakit;
7. pengendalian koordinasi teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Kelompok Sub-substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Kelompok Sub-substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
3. pengendalian pengamatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular;
4. pengendalian pengamatan, pencegahan dan penanggulangan kesehatan jiwa,
5. pengendalian pengamatan, pencegahan dan penanggulangan penggunaan NAPZA;
6. pengendalian kebutuhan sarana dan operasional kegiatan program pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan NAPZA;
7. pengendalian koordinasi teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**4. Bidang Pelayanan Kesehatan**

Bidang Pelayanan Kesehatan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

4.1 Kelompok Sub-substansi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan surveilans dan imunisasi.

Kelompok Sub-substansi Pelayanan Kesehatan Primer, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer;
3. pengendalian peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer Puskesmas dan Rumah Sakit;
4. pengendalian peningkatan mutu pelayanan kesehatan unggulan spesialistik;
5. pengendalian peningkatan mutu penanggulangan masalah kesehatan dan kegawatdaruratan;
6. pengendalian peningkatan mutu pemeliharaan dan pemulihan kesehatan;
7. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer;dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Kelompok Sub-substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan.

Kelompok Sub-substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
3. pengendalian peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
4. pengendalian peningkatan mutu pelayanan kesehatan penunjang diagnostik;
5. pengendalian fasilitasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
6. pengendalian koordinasi teknis peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Kelompok Sub-substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas mengendalikan peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional.

Kelompok Sub-substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional;
3. pengendalian peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional;
4. pengendalian koordinasi teknis peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional;
5. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**5. Bidang Sumber Daya Kesehatan**

Bidang Sumber Daya Kesehatan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

5.1 Kelompok Sub-substansi Kefarmasian mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan surveilans dan imunisasi.

Kelompok Sub-substansi Kefarmasian, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan manajemen Kefarmasian;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan manajemen Kefarmasian;
3. pengendalian pengelolaan perbekalan kefarmasian dan kesehatan pangan, dan kosmetika yang beredar;
4. pengendalian obat-obatan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
5. pengendalian pelayanan obat generik di Puskesmas dan rumah sakit pemerintah;
6. pengendalian pembinaan penggunaan, penyimpanan dan pemusnahan obat dengan cara yang benar;
7. pengendalian pengelolaan gudang instalasi farmasi kabupaten;
8. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan manajemen Kefarmasian;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan manajemen Kefarmasian;dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Kelompok Sub-substansi Alat Kesehatan dan PKRT mempunyai tugas peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan.

Kelompok Sub-substansi Alat Kesehatan dan PKRT menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan alat kesehatan dan PKRT;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan alat kesehatan dan PKRT;
3. pengendalian penyusunan analisis kebutuhan alat kesehatan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah;
4. pengendalian penyediaan, penggunaan dan pemanfaatan alat kesehatan pada Puskesmas;
5. pengendalian pemeliharaan alat kesehatan pada Puskesmas;
6. pengendalian penghapusan dan pemusnahan alat kesehatan pada Puskesmas;
7. pengendalian pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan;
8. pengendalian pelaksanaan pembangunan sarana kesehatan;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan alat kesehatan dan PKRT; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.3 Kelompok Sub-substansi Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas mengendalikan manajemen sumber daya manusia kesehatan.

Kelompok Sub-substansi Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis manajemen sumber daya manusia kesehatan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional manajemen sumber daya manusia kesehatan;
3. pengendalian analisis kebutuhan sumber daya manusia kesehatan Kabupaten;
4. pengendalian pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar, studi banding, magang dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya;
5. pengendalian pembinaan disiplin dan kinerja sumber daya manusia kesehatan;
6. pengendalian pelaksanaan kode etik profesi sumber daya manusia kesehatan;
7. pengendalian penyelenggaraan registerasi dan akreditasi tenaga medis dan tenaga paramedis;
8. pengendalian fasilitasi rekomendasi perizinan sarana praktik tenaga kesehatan, sarana pelayanan kesehatan dan sarana sarana lain yang berhubungan dengan tehnis kesehatan;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan manajemen sumber daya manusia kesehatan;dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**V. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

1. **Sekretariat**

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

1.1 Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
3. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
4. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
5. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
6. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
7. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
8. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
9. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
3. pengendalian administrasi keuangan;
4. pengendalian perbendaharaan;
5. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
6. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
7. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi;dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
10. **Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Kelompok Sub-substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
3. pengendalianpelaksanaan orientasi petugas pendataan;
4. pengendalian pelaksanaan pendataan keluarga;
5. pengendalian penyusunan profil dan pemetaan tahapan keluarga sejahtera;
6. pengendalian pemanfaatan informasi keluarga untuk penyusunan strategi pengendalian penduduk;
7. pengendalian pelaksanaan sinkronisasi program pengendalian penduduk;
8. pengendaliankoordinasi teknis pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporanpengendalian penduduk dan informasi keluarga; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Advokasi, Penggerakan, dan Penyuluhan mempunyai tugas mengendalikan Advokasi, Penggerakan, dan Penyuluhan.

Kelompok Sub-substansi Advokasi, Penggerakan, dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan advokasi, penggerakan, dan penyuluhan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan advokasi, penggerakan, dan penyuluhan;
3. pengendalian pendampingan, pembinaan, advokasi dan penggerakan kepada masyarakat;
4. pengendalianpenyerasian klarifikasi pentahapan advokasi dan penggerakan program KKBPK;
5. pengendalian pengembangan mediaadvokasi, komunikasi,informasi dan edukasi;
6. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan advokasi, penggerakan, dan penyuluhan;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan advokasi, penggerakan, dan penyuluhan;dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

3.1 Kelompok Sub-substansi Keluarga Berencana mempunyai tugas mengendalikan pembinaan dan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana.

Kelompok Sub-substansi Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan dan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana;
3. pengendalian pelayanan keluarga berencana;
4. pengendalian dukunganpelayanan rujukan, dukungan alat dan obat kontrasepsi;
5. pengendalian peningkatanpartisipasi pria dan jaminan pelayanan keluargaberencana;
6. pengendalian pembinaan kesehatan dan fasilitasi pelayanan reproduksi remaja melalui jalur keluarga, antar sektorpemerintah dan lembaga sosial organisasi masyarakat(LSOM);
7. pengendalian koordinasi teknis pembinaan dan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-substansi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas mengendalikan pembinaan dan fasilitasi pelayanan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Kelompok Sub-substansi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan fasilitasi pelayanan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan dan fasilitasi pelayanan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. pengendalian pengembangan dan pendampingan kelompok UPPKS;
4. pengendalian pemberdayaan ekonomi keluarga;
5. pengendalian pembinaan bagi Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
6. pengendalian pengembangan ketahanankeluarga dan peningkatan kualitas lingkungankeluarga;
7. pengendalian pengembangan dan pembinaan keluarga remaja dan pusat informasi konseling remaja;
8. pengendalian koordinasi teknis pembinaan dan fasilitasi pelayanan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan fasilitasi pelayanan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Kelompok Sub-substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan dokumentasi dan informasi hukum.

Kelompok Sub-substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum, menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. penghimpunan serta pengolahan data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah;
3. pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
4. pemberian pelayanan administrasi informasi produk hukum;
5. pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum daerah; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

4.1 Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan perempuan.

Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan Perempuan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan perempuan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan perempuan;
3. pengendalian Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, danpolitik;
4. pengendalian peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
5. pengendalian perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah terkena bencana;
6. pengendalian fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan pengembangan penguatan jaringan kerja lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk kesejahteraan dan perlindungan perempuan;
7. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan perempuan;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan perempuan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Kelompok Sub-substansi Perlindungan Anak mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perlindungan anak.

Kelompok Sub-substansi Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perlindungan anak;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perlindungan anak;
3. pengendalian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perlindungan anak;
4. pengendalian fasilitasi perlindungan anak terhadap kekerasan dan perlindungan anak di daerah konflik dan daerah terkena bencana;
5. pengendalian fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan pengembangan penguatan jaringan kerja lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk kesejahteraan dan perlindungan anak;
6. pengendalian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perlindungan anak;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perlindungan anak; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**VI. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

1. **Sekretariat**

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

1.1 Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
3. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
4. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
5. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
6. pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
7. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
8. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
9. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
3. pengendalian administrasi keuangan;
4. pengendalian perbendaharaan;
5. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
6. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
7. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2. Bidang Pendidikan dan Pengajaran**

Bidang Pendidikan dan Pengajaran mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-substansi Pengembangan Bakat dan Minat mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan Pengembangan Bakat dan Minat peserta didik.

Kelompok Sub-substansi Pengembangan Bakat dan Minat menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan bakat dan minat peserta didik;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional Pengembangan Bakat dan Minat peserta didik;
3. pengendalian pengembangan dan penetapan kurikulum pengembangan bakat dan minat;
4. pengendalian inventarisasi bakat dan minat peserta didik;
5. pengendalian pelaksanan pembinaan dan pengembangan bakat dan minat;
6. pengendalian kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan bakat dan minat peserta didik;
7. pengendalian fasilitasi wahana penyaluran bakat dan minat peserta didik;
8. pengendalian pembinaan prestasi bakat dan minat peserta didik;
9. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pengembangan bakat dan minat peserta didik;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan bakat dan minat peserta didik; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan**

Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

3.1 Kelompok Sub-substansi Data dan Informasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan dan pengembangan data dan informasi Pendidikan.

Kelompok Sub-substansi Data dan Informasi, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan data dan informasi Pendidikan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan dan pengembangan data dan informasi Pendidikan;
3. pengendalian penyusunan profil pendidikan sesuai kewenangan daerah;
4. pengendalian pengolahan data pokok kependidikan;
5. pengendalian pengelolaan nomor pokok sekolah nasional, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, dan nomor induk siswa nasional
6. pengendalian pengelolan dan validasi mutasi siswa;
7. pengendalian back up database kependidikan;
8. pengendalian peremajaan data kependidikan;
9. pengendalian pemberian pelayanan data dan informasi kependidikan;
10. pengendalian pengembangan teknologi dan sistem informasi pendidikan;
11. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan dan pengembangan data dan informasi Pendidikan;
12. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan pengembangan data dan informasi Pendidikan;dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat**

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

4.1 Kelompok Sub-substansi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pendidikan masyarakat.

Kelompok Sub-substansi Pendidikan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan masyarakat;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pendidikan masyarakat;
3. pengendalian penerimaan peserta didik/ warga belajar pada pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
4. pengendalian pengelolaan program keaksaraan fungsional;
5. pengendalian pengelolaan program kesetaraan Paket A, B dan C;
6. pengendalian pengelolaan tenaga Pendidik dan Kependidikan program keaksaraan dan kesetaraan;
7. pengendalian standarisasi hasil belajar warga belajar pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
8. pengendalian pendirian, perubahan dan penutupan Lembaga pendidikan kursus dan pelatihan;
9. pengendalian pemberdayaan Lembaga pendidikan kursus dan pelatihan;
10. pengendalian pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal pada pendidikan kursus dan pelatihan;
11. pengendalian standarisasi hasil belajar warga belajar pendidikan kursus dan pelatihan;
12. pengendalian peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia pengelola dan tenaga kependidikan lembaga kursus dan pelatihan;
13. pengendalian standarisasi dan akreditasi lembaga kursus dan pelatihan;
14. pengendalian pelaksanaan pendidikan keluarga dan kewirausahaan
15. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pendidikan masyarakat;
16. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan masyarakat; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**5. Bidang Sarana dan Prasarana**

Bidang Sarana dan Prasarana mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

5.1 Kelompok Sub-substansi Pengelolaan Aset mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan barang pada Satuan Pendidikan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Kelompok Sub-substansi Pengelolaan Aset menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan barang pada Satuan Pendidikan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan barang pada Satuan Pendidikan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
3. pengendalian pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Barang pada Satuan Pendidikan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
4. pengendalian administrasi pengelolaan barang pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. pengendalian administrasi pengelolaan barang pada Satuan Pendidikan Masyarakat;
6. pengendalian administrasi pengelolaan barang pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
7. pengendalian administrasi pengelolaan barang pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
8. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan barang pada Satuan Pendidikan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan barang pada Satuan Pendidikan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**6. Bidang Kebudayaan**

Bidang Kebudayaan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

6.1 Kelompok Sub-substansi Pengembangan Nilai-Nilai Budaya, Sejarah, Cagar Budaya dan Museum mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengembangan nilai-nilai budaya, sejarah, cagar budaya dan museum.

Kelompok Sub-substansi Seksi Pengembangan Nilai-Nilai Budaya, Sejarah, Cagar Budaya dan Museum, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan nilai-nilai budaya, sejarah, cagar budaya dan museum;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengembangan nilai-nilai budaya, sejarah, cagar budaya dan museum;
3. pengendalian pengembangan dan penanaman nilai-nilai budaya;
4. pengendalian pembinaan lembaga adat;
5. pengendalian pendataan situs dan pengelolaan cagar budaya;
6. pengendalian pengembangan dan pengelolaan museum;
7. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pengembangan nilai-nilai budaya, sejarah, cagar budaya dan museum;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan nilai-nilai budaya, sejarah, cagar budaya dan museum; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.2 Kelompok Sub-substansi Pembinaan Kesenian Daerah mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembinaan kesenian daerah.

Kelompok Sub-substansi Pembinaan Kesenian Daerah, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan kesenian daerah;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembinaan kesenian daerah;
3. pengendalian sistem informasi kesenian daerah;
4. pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya daerah;
5. pengendalianpelaksanaan pagelaran seni dan budaya;
6. pengendalian pemberdayaan kelompok kesenian dan sanggar seni budaya;
7. pengendalian pemberdayaan sumber daya manusia pelaku seni dan budaya daerah;
8. pengendalian pelaksanaan misi kesenian daerah baik perseorangan maupun kelompok sebagai duta kesenian daerah;
9. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pembinaan kesenian daerah;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kesenian daerah; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**VII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

1. **Sekretariat**

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

1.1 Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan pelaporan Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
3. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
4. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
5. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
6. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
7. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
8. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
9. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-substansi Identitas Penduduk mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan administrasi identitas penduduk.

Kelompok Sub-substansi Identitas Penduduk menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi identitas penduduk;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan administrasi identitas penduduk;
3. pengendalian pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
4. pengendalian pendaftaran dan pencatatan identitas penduduk;
5. pengendalian pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk;
6. pengendalian pengolahan data pemberian nomor induk penduduk, penerbitan kartu keluarga, dan kartu penduduk;
7. pengendalian pelayanan biodata penduduk dan nomor induk kependudukan (NIK);
8. pengendalian pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
9. pengendalian koordinasi teknis administrasi identitas penduduk;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi identitas penduduk;dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan administrasi identitas penduduk.

Kelompok Sub-substansi Pindah Datang Penduduk menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pindah datang penduduk;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan administrasi pindah datang penduduk;
3. pengendalian pendaftaran dan pencatatan mutasi penduduk warga negara indonesia dan warga negara asing;
4. pengendalian pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk warga negara Indonesia dan warga negara asing;
5. pengendalian administrasi mutasi data perpindahan dan kedatangan penduduk warga negara Indonesia dan warga negara asing;
6. pengendalian pengelolaan pendaftaran dan pencatatan perubahan data mutasi penduduk warga negara Indonesia dan warga negara asing;
7. pengendalian pelayanan perpindahan penduduk inter dan intra daerah serta antar negara;
8. pengendalian pelayanan penerbitan Surat Keterangan Kependudukan;
9. pengendalian pelayanan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memegang KITAS;
10. pengendalian koordinasi teknis administrasi pindah datang penduduk;
11. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi pindah datang penduduk; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Kelompok Sub-substansi Pendataan Penduduk mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pendataan penduduk.

Kelompok Sub-substansi Pendataan Penduduk, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pendataan penduduk;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pendataan penduduk;
3. pengendalian pendataan penduduk;
4. pengendalian pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan;
5. pengendalian pemeriksaan dan penelitian kelengkapan data kependudukan;
6. pengendalian mutasi data kependudukan;
7. pengendalian koordinasi teknis pendataan penduduk;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendataan penduduk; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

3.1 Kelompok Sub-substansi Kelahiran mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan administrasi pencatatan kelahiran.

Kelompok Sub-substansi Kelahiran, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pencatatan kelahiran;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan administrasi pencatatan kelahiran;
3. pengendalian pelayanan dan penerbitan akta kelahiran;
4. pengendalian pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran dan pencatatan kelahiran;
5. pengendalian koordinasi teknis administrasi pencatatan kelahiran;
6. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi pencatatan kelahiran; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-substansi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan administrasi perkawinan dan perceraian.

Kelompok Sub-substansi Perkawinan dan Perceraian, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi perkawinan dan perceraian;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan administrasi perkawinan dan perceraian;
3. pengendalian pelayanan dan penerbitan akta perkawinan dan akta perceraian;
4. pengendalian pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran dan pencatatan perkawinan dan perceraian;
5. pengendalian koordinasi teknis administrasi perkawinan dan perceraian;
6. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi perkawinan dan perceraian; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Kelompok Sub-substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan administrasi pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.

Kelompok Sub-substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan administrasi pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian;
3. pengendalian pelayanan administrasi pengangkatan anak;
4. pengendalian pelayanan administrasi pengakuan anak,
5. pengendalian pelayanan administrasi pengesahan anak
6. pengendalian pelayanan administrasi perubahan status kewarganegaraan
7. pengendalian pelayanan administrasi pencatatan kematian
8. pengendalian koordinasi teknis administrasi pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
11. **Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

4.1 Kelompok Sub-substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Kelompok Sub-substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
3. pengendalian pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
4. pengendalian pengelolaan updating data dan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;;
6. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Kelompok Sub-substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas mengendalikan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

Kelompok Sub-substansi Pengendalian Program, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengolahan dan penyajian data kependudukan;
3. pengendalian pengolahan dan penyajian data kependudukan;
4. pengendalian desain infografis, audio, video, animasi data kependudukan;
5. pengendalian publikasi dan penyajian data kependudukan melalui media elektronik maupun non elektronik;
6. pengendalian koordinasi teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengolahan dan penyajian data kependudukan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Kelompok Sub-substansi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas mengendalikan tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

Kelompok Sub-substansi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
3. pengendalian tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
4. pengendalian pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
5. pengendalian pengembangan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
6. pengendalian koordinasi teknis tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**

Bagian Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

5.1 Kelompok Sub-substansi Kerjasama mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kerjasama pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Kelompok Sub-substansi Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis kerjasama pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kerjasama pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
3. pengendalian kerjasama pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
4. pengendalian koordinasi teknis kerjasama pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
5. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan kerjasama pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Kelompok Sub-substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas mengendalikan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Kelompok Sub-substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
3. pengendalian pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
4. pengendalian koordinasi teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
5. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.3 Kelompok Sub-substansi Inovasi Pelayanan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Kelompok Sub-substansi Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
3. pengendalian inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
4. pengendalian koordinasi teknis inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
5. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**VIII. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA**

1. **Sekretariat**

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

1.1 Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
3. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
4. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
5. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
6. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
7. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
8. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
9. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
3. pengendalian administrasi keuangan;
4. pengendalian perbendaharaan;
5. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
6. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
7. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi;dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2**. **Bidang Pemuda**

Bidang Pemuda mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas mengendalikan pemberdayaan pemuda.

Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan pemuda;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pemberdayaan pemuda;
3. pengendalian pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Pemuda;
4. pengendalian bhakti sosial kepemudaan;
5. pengendalian pemberdayaan kewirausahaan Pemuda;
6. pengendalian kegiatan peran serta Pemuda dalam pembangunan;
7. pengendalian koordinasi teknis pemberdayaan pemuda;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan pemuda; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Kepeloporan, Kemitraan dan Organisasi Pemuda mempunyai tugas mengendalikan pemberdayaan organisasi pemuda melalui kepeloporan dan kemitraan organisasi pemuda.

Kelompok Sub-substansi Kepeloporan, Kemitraan dan Organisasi Pemuda menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan organisasi pemuda melalui kepeloporan dan kemitraan organisasi pemuda;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pemberdayaan organisasi pemuda melalui kepeloporan dan kemitraan organisasi pemuda;
3. pengendalian pemberdayaan organisasi kepemudaan;
4. pengendalian kepeloporan organisasi pemuda;
5. pengendalian kemitraan organisasi pemuda dengan Pemerintah Daerah, masyarakat dan antar organisasi pemuda;
6. pengendalian koordinasi teknis pemberdayaan organisasi pemuda melalui kepeloporan dan kemitraan organisasi pemuda;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan organisasi pemuda melalui kepeloporan dan kemitraan organisasi pemuda; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bidang Olahraga**

Bidang Olahraga mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

3.1 Kelompok Sub-substansi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas mengendalikan peningkatan prestasi olahraga.

Kelompok Sub-substansi Peningkatan Prestasi Olahraga, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis peningkatan prestasi olahraga;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peningkatan prestasi olahraga;
3. pengendalian pemberdayaan olahraga prestasi melalui jalur individu;
4. pengendalian pemberdayaan olahraga prestasi melalui jalur kelompok, club atau organisasi;
5. pengendalian pemberdayaan olahraga prestasi melalui jalur masyarakat;
6. pengendalian pemberdayaan olahraga prestasi melalui jalur pendidikan;
7. pengendalian pemberdayaan sumber daya manusia olahraga yang menunjang prestasi;
8. pengendalian koordinasi teknis peningkatan prestasi olahraga;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan prestasi olahraga; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-substansi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembudayaan olahraga.

Kelompok Sub-substansi Pembudayaan Olahraga, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembudayaan olahraga;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembudayaan olahraga;
3. pengendalian pengembangan kesadaran masyarakat untuk berolahraga;
4. pengendalian pemberdayaan olahraga rekreasi;
5. pengendalian pemberdayaan olahraga tradisional;
6. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pembudayaan olahraga;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembudayaan olahraga; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Kelompok Sub-substansi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan peningkatan sarana prasarana olah raga dan kemitraan olahraga.

Kelompok Sub-substansi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan sarana prasarana olah raga dan kemitraan olahraga;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan peningkatan sarana prasarana olahraga dan kemitraan olahraga;
3. pengendalian peningkatan sarana prasarana olahraga;
4. pengendalian pemanfaatan teknologi olahraga;
5. pengendalian kemitraan dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan fasilitas olah raga publik;
6. pengendalian koordinasi teknis peningkatan sarana prasarana olah raga dan kemitraan olahraga;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan sarana prasarana olah raga dan kemitraan olahraga; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**4. Bidang Usaha Pariwisata**

Bidang Usaha Pariwisata mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

4.1 Kelompok Sub-substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas mengendalikan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata.

Kelompok Sub-substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
3. pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan strategis pariwisata;
4. pengendalian pelaksanaan pengembangan destinasi wisata;
5. pengendalian peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
6. pengendalian kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka peningkatan sarana prasarana yang menunjang daya saing pariwisata;
7. pengendalian koordinasi teknis peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Kelompok Sub-substansi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan mempunyai tugas mengendalikan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.

Kelompok Sub-substansi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan;
3. pengendalian pembinaan kelembagaan usaha pariwisata;
4. pengendalian pembinaan daya saing sumber daya manusia pariwisata;
5. pengendalian pembinaan masyarakat untuk mendukung pengembangan usaha pariwisata;
6. pengendalian koordinasi teknis pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan;dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**5. Bidang Promosi Wisata**

Bidang Promosi Wisata mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

5.1 Kelompok Sub-substansi Pengembangan dan Promosi Wisata mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengembangan promosi wisata dan pelayanan informasi pariwisata.

Kelompok Sub-substansi Pengembangan dan Promosi Wisata, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan promosi wisata dan pelayanan informasi pariwisata;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan promosi wisata dan pelayanan informasi pariwisata;
3. pengendalian pelaksanaan promosi wisata dalam daerah dan luar daerah;
4. pengendalian pengembangan sistem informasi pariwisata daerah;
5. pengendalian koordinasi teknis pengembangan promosi wisata dan pelayanan informasi pariwisata;
6. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan promosi wisata dan pelayanan informasi pariwisata; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Kelompok Sub-substansi Pengembangan dan Promosi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas mengendalikan pengembangan dan promosi ekonomi kreatif.

Kelompok Sub-substansi Pengembangan dan Promosi Ekonomi Kreatif, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan promosi ekonomi kreatif;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan dan promosi ekonomi kreatif;
3. pengendalian pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif pariwisata;
4. pengendalian promosi hasil ekonomi kreatif pariwisata;
5. pengendalian koordinasi teknis pengembangan dan promosi ekonomi kreatif;
6. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan promosi ekonomi kreatif; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**IX. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

1. **Sekretariat**

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

1.1 Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
3. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
4. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
5. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
6. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
7. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
8. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
9. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2. Bidang Sumber Daya Air**

Bidang Sumber Daya Air mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-substansi Irigasi mempunyai tugas mengendalikan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana irigasi.

Kelompok Sub-substansi Irigasi Spiritual menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana irigasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana irigasi;
3. pengendalian penyusunan data kebutuhan prioritas sarana prasarana irigasi;
4. pengendalian pelaksanaan pembangunan peningkatan jaringan irigasi;
5. pengendalian pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan kontruksi jaringan irigasi;
6. pengendalian koordinasi teknis pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana irigasi;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana irigasi; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Sungai, Pantai dan Rawa mempunyai tugas mengendalikan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya.

Kelompok Sub-substansi Seksi Sungai, Pantai dan Rawa Spiritual menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pembangunan dan peningkatan sarana prasarana sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembangunan dan peningkatan sarana prasarana sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya;
3. pengendalian penyusunan data kebutuhan prioritas sarana prasarana sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya;
4. pengendalian pelaksanaan pembangunan peningkatan sarana prasarana sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya;
5. pengendalian pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan kontruksi sarana prasarana sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya;
6. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan sungai, pantai dan rawa;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sungai, pantai dan rawa; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Kelompok Sub-substansi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya.

Kelompok Sub-substansi Operasi dan Pemeliharaan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya;
3. pengendalian pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
4. pengendalian pemberdayaan kelembagaan sumber daya air;
5. pengendalian daya rusak air;
6. pengendalian sistim informasi sumber daya air;
7. pengendalian pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi;
8. pengendalian pengembangan dan pengelolaan pada sungai, pantai, dan rawa;
9. pengendalian pengembangan dan pengelolaan pada sumber daya air lainnya;
10. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya;
11. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bidang Bina Marga**

Bidang Bina Marga mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

3.1 Kelompok Sub-substansi Jalan mempunyai tugas mengendalikan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan berkala jalan.

. Kelompok Sub-substansi Jalan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan berkala jalan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan berkala jalan;
3. pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan;
4. pengendalian pelaksanaan peningkatan jalan;
5. pengendalian pelaksanaan rehabilitasi jalan;
6. pengendalian pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan;
7. pengendalian koordinasi teknis pembangunan jalan sesuai kewenangan daerah;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan jalan sesuai kewenangan daerah; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-substansi Jembatan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan penggantian jembatan.

Kelompok Sub-substansi Seksi Jembatan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan penggantian jembatan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan penggantian jembatan;
3. pengendalian pelaksanaan pembangunan jembatan;
4. pengendalian pelaksanaan rehabilitasi jembatan;
5. pengendalian pelaksanaan penggantian jembatan;
6. pengendalian koordinasi teknis pembangunan jembatan sesuai kewenangan daerah;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan jembatan sesuai kewenangan daerah; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Kelompok Sub-substansi Pemeliharaan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengelolaan data kondisi dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

Kelompok Sub-substansi Pemeliharaan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan data kondisi dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengelolaan data kondisi dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
3. pengendalian pengelolaan sistem informasi jalan dan jembatan;
4. pengendalian pemeliharaan rutin jalan;
5. pengendalian pemeliharaan rutin jembatan;
6. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**4. Bidang Cipta Karya**

Bidang Cipta Karya mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

4.1 Kelompok Sub-substansi Drainase dan Jalan Non Status mempunyai tugas mengendalikan pembangunan dan pemeliharaan drainase dan jalan non status.

Kelompok Sub-substansi Drainase dan Jalan Non Status menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pembangunan dan pemeliharaan drainase dan jalan non status;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembangunan dan pemeliharaan drainase dan jalan non status;
3. pengendalian pembangunan dan pemeliharaan drainase;
4. pengendalian pembangunan dan pemeliharaan jalan non status
5. pengendalian koordinasi teknis pembangunan dan pemeliharaan drainase dan jalan non status;
6. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan pemeliharaan drainase dan jalan non status; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Kelompok Sub-substansi Air Minum dan Sanitasi mempunyai tugas mengendalikan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana air minum dan sanitasi.

Kelompok Sub-substansi Air Minum dan Sanitasi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana air minum dan sanitasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana air minum dan sanitasi;
3. pengendalian pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana air minum;
4. pengendalian pembangunan dan pemeliharaan sanitasi;
5. pengendalian koordinasi teknis pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana air minum dan sanitasi;
6. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana air minum dan sanitasi; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Kelompok Sub-substansi Bangunan Gedung mempunyai tugas mengendalikan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah daerah.

Kelompok Sub-substansi Bangunan Gedung, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah daerah;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah daerah;
3. pengendalian pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah daerah;
4. pengendalian koordinasi teknis pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah daerah;
5. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

**5. Bidang Bina Konstruksi**

Bidang Bina Konstruksi mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

5.1 Kelompok Sub-substansi Bina Tehnik mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan bina tehnik konstruksi.

Kelompok Sub-substansi Bina Tehnik menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan bina tehnik konstruksi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan bina tehnik konstruksi;
3. pengendalian pelaksanaan pelatihan keahlian dan ketrampilan konstruksi;
4. pengendalian fasilitasi bina tehnik pekerjaan konstruksi;
5. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan bina tehnik konstruksi;
6. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bina tehnik konstruksi; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Kelompok Sub-substansi Jasa Konstruksi mempunyai tugas mengendalikan fasilitasi jasa konstruksi.

Kelompok Sub-substansi Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis fasilitasi jasa konstruksi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional fasilitasi jasa konstruksi;
3. pengendalian penyusunan dan pengaturan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi;
4. pengendalian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan forum jasa konstruksi, pengembangan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait pembinaan kelembagaan jasa konstruksi;
5. pengendalian penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan sistem manajemen lingkungan;
6. pengendalian fasilitasi pengembangan kompetensi keterampilan dan keahlian konstruksi;
7. pengendalian pelayanan rekomendasi izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
8. pengendalian koordinasi teknis fasilitasi jasa konstruksi;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi jasa konstruksi; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.3 Kelompok Sub-substansi Laboratorium mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pelayanan laboratorium konstruksi.

Kelompok Sub-substansi Laboratorium menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan laboratorium konstruksi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pelayanan laboratorium konstruksi;
3. pengendalian penyusunan standard mutu bahan dan material jalan, jembatan, dan konstruksi lainnya;
4. pengendalian pengujian mutu bangunan dan material bahan bangunan;
5. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pelayanan laboratorium konstruksi;
6. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan laboratorium konstruksi; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**6. Bidang Penataan Ruang**

Bidang Penataan Ruang mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

6.1 Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pengaturan mempunyai tugas mengendalikan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pengaturan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis perencanaan dan pengaturan tata ruang;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional perencanaan dan pengaturan tata ruang;
3. Pengendalian penyusunan rencana tindak lanjut penataan ruang berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang;
4. pengendalian penataan ruang berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang;
5. pengendalian koordinasi teknis perencanaan dan pengaturan tata ruang;
6. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pengaturan tata ruang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.2 Kelompok Sub-substansi Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai tugas mengendalikan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

Kelompok Sub-substansi Pemanfaatan dan Pengendalian, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
3. pengendalian pemanfaatan tata ruang;
4. pengendalian koordinasi teknis pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
5. pengendalian pelayanan rekomendasi izin mendirikan bangunan;
6. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.3 Kelompok Sub-substansi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tata ruang.

Kelompok Sub-substansi Pembinaan dan Pengawasan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tata ruang;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tata ruang;
3. pengendalian pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
4. pengendalian pelaksanaan pengawasan penataan ruang;
5. pengendalian koordinasi teknis pembinaan dan pengawasan tata ruang;
6. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tata ruang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**X. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

1. **Sekretariat**

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

1.1 Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
3. pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
4. pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
5. pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
6. pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
7. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
8. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
9. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas;dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
3. pengendalian administrasi keuangan;
4. pengendalian perbendaharaan;
5. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
6. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
7. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-substansi Tanaman Pangan mempunyai tugas mengendalikan pembinaan dan pengembangan tanaman pangan.

Kelompok Sub-substansi Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan tanaman pangan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan dan pengembangan tanaman pangan;
3. pengendalian penerapan teknologi padi dan palawija;
4. pengendalian pemberdayaan serta pengembangan kawasan komoditas padi dan palawija ramah lingkungan;
5. pengendalian penyusunan profil dan analisa kelayakan komoditas padi dan palawija unggulan;
6. pengendalian penilaian varietas, pengawasan mutu benih dan pemanfaatan teknologi perbenihan;
7. pengendalian budidaya dan pascapanen;
8. pengendalian koordinasi teknis pembinaan dan pengembangan tanaman pangan;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengembangan tanaman pangan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Hortikultura mempunyai tugas mengendalikan pengembangan dan pengelolaan Hortikultura.

Kelompok Sub-substansi Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan Hortikultura;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan dan pengelolaan Hortikultura;
3. pengendalian penerapan teknologi hortikultura;
4. pengendalian pemberdayaan serta pengembangan kawasan komoditas hortikultura ramah lingkungan;
5. pengendalian penyusunan profil dan analisa kelayakan komoditas hortikultura unggulan;
6. pengendalian penilaian varietas, pengawasan mutu benih dan pemanfaatan teknologi perbenihan;
7. pengendalian budidaya dan pascapanen;
8. pengendalian koordinasi teknis pengembangan dan pengelolaan Hortikultura;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pengelolaan Hortikultura; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Kelompok Sub-substansi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan perlindungan tanaman.

Kelompok Sub-substansi Perlindungan Tanaman menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pelaksanaan perlindungan tanaman;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan perlindungan tanaman;
3. pengendalian pelaksanaan sosialisasi tentang pupuk dan pestisida terdaftar dan diijinkan penggunaannya;
4. pengendalian uji mutu pestisida, pupuk, kimia tanah dan kandungan bahan kimia berbahaya pada produk tanaman pangan dan hortikultura;
5. pengendalian pengamatan dan perlindungan dampak perubahan iklim;
6. pengendalian pengaruh iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
7. pengendalian penanggulangan organisme pengganggu tanaman;
8. pengendalian pengelolaan pengendalian hama terpadu;
9. pengendalian pengembangan dan pemasyarakatan teknologi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura berbasis ramah lingkungan;
10. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan perlindungan tanaman;
11. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tanaman; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bidang Peternakan**

Bidang Peternakan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

3.1 Kelompok Sub-substansi Produksi dan Teknologi Peternakan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan peningkatan produksi dan pengembangan teknologi peternakan.

Kelompok Sub-substansi Produksi dan Teknologi Peternakan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis peningkatan produksi dan pengembangan teknologi peternakan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peningkatan produksi dan pengembangan teknologi peternakan;
3. pengendalian pembinaan teknis budidaya, teknologi produksi dan reproduksi ternak;
4. pengendalian mutu pakan asal hewan;
5. pengendalian mutu bahan pakan asal tumbuhan;
6. pengendalian budidaya pakan hijauan;
7. pengendalian produksi pakan olahan dan pengolahan pakan;
8. pengendalian pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan ternak;
9. pengendalian pemuliabiakan ternak dengan teknologi peningkatan mutu ternak;
10. pengendalian pengawasan peredaran dan penggunaan semen;
11. pengendalian pengembangan hijauan pakan ternak dan limbah pertanian agroindustry;
12. pengendalian koordinasi teknis peningkatan produksi dan pengembangan teknologi peternakan;
13. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan produksi dan pengembangan teknologi peternakan; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-substansi Keswan dan Kesmavet mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Kelompok Sub-substansi Keswan dan Kesmavet, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
3. pengendalian pengamatan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
4. pengendalian pengelolaan pelayanan jasa laboratorium;
5. pengendalian pengelolaan pelayanan jasa medik veteriner;
6. pengendalian perlindungan hewan;
7. pengendalian pengembangan kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan;
8. pengendalian pengamatan epidemiologi dan ekonomi veteriner;
9. pengendalian pelaksanaan analisis risiko penyakit eksotik;
10. pengendalian penanganan kesiagaan darurat penyakit hewan;
11. pengendalian pembangan kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan;
12. pengendalian pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran obat hewan
13. pengendalian pascapanen, higiene sanitasi, pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraanhewan, serta pengujian dan sertifikasi produk hewan;
14. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
15. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Kelompok Sub-substansi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan peternakan.

Kelompok Sub-substansi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penyebaran dan pengembangan peternakan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan penyebaran dan pengembangan peternakan;
3. pengendalian penyiapan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
4. pengendalian pencatatan, seleksi, pengujian dan pengawasan serta pemberian surat keterangan mutu bibit ternak untuk keluar/masuk kabupaten;
5. pengendalian pengelolaan kawasan penggembalaan dan integrasi ternak;
6. pengendalian penataan, distribusi dan redistribusi ternak;
7. pengendalian budidaya ternak potong, perah, unggas dan aneka ternak, serta usaha dan kelembagaan;
8. pengendalian pengawasan, peredaran dan penggunaan bibit ternak, mutu dan produktivitas ternak bibit;
9. pengendalian pelaksanaan identifikasi, potensi dan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
10. pengendalian penyusunan usul penetapan tata ruang kawasan peternakan;
11. pengendalian penataan distribusi dan redistribusi ternak;
12. pengendalian pengawasan penyebaran serta pengembangan ternak di daerah pengembangan;
13. pengendalian fasilitasi pengembangan potensi peternakan melalui kemitraan;
14. pengendalian koordinasi teknis penyebaran dan pengembangan peternakan;
15. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan peternakan; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
17. **Bidang Perkebunan**

Bidang Perkebunan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

4.1 Kelompok Sub-substansi Pengembangan Usaha dan Pasca Panen mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengembangan usaha dan pasca panen.

Kelompok Sub-substansi Pengembangan Usaha dan Pasca Panen, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan usaha dan pasca panen;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengembangan usaha dan pasca panen;
3. pengendalian penyusunan data dan informasi harga pasar komoditas tanaman perkebunan;
4. pengendalian penyusunan profil dan analisa kelayakan komoditas perkebunan unggulan;
5. pengendalian penyediaan sarana dan prasarana pasca panen perkebunan;
6. pengendalian fasilitasi rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan;
7. pengendalian sertifikasi hasil produksi unggulan komoditas perkebunan;
8. pengendalian pemanfaatan teknologi dan sarana pascapanen;
9. pengendalian fasilitasi pendaftaran varietas komoditas perkebunan;
10. pengendalian pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan usaha perkebunan;
11. pengendalian promosi hasil produksi perkebunan;
12. pengendalian kegiatan demplot komoditas perkebunan;
13. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pengembangan usaha dan pasca panen;
14. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan usaha dan pasca panen; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Kelompok Sub-substansi Peningkatan Produksi mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan peningkatan produksi perkebunan.

Kelompok Sub-substansi Peningkatan Produksi, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan produksi perkebunan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan peningkatan produksi perkebunan;
3. pengendalian penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan;
4. pengendalian bimbingan teknis dan supervisi dalam peningkatan penerapan teknologi perkebunan;
5. pengendalian pemberdayaan dan pengembangan kawasan komoditas perkebunan;
6. pengendalian registrasi kebun dan lahan komoditas perkebunan;
7. pengendalian pelaksanaan pengawasan dan peredaran benih komoditas perkebunan;
8. pengendalian perbaikan infrastruktur lahan dan air di kawasan perkebunan;
9. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan peningkatan produksi perkebunan;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan produksi perkebunan; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Kelompok Sub-substansi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas mengendalikan perlindungan tanaman perkebunan.

Kelompok Sub-substansi Perlindungan Tanaman Perkebunan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis perlindungan tanaman perkebunan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional perlindungan tanaman perkebunan;
3. pengendalian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan hama/ penyakit tanaman perkebunan;
4. pengendalian pengelolaan sarana prasarana pengendalian organisasi pengganggu tanaman;
5. pengendalian pengawasan terhadap penggunaan peralatan dan bahan perlindungan tanaman perkebunan;
6. pengendalian pelaksanaan pengawasan penggunaan dan peredaran pestisida;
7. pengendalian penanggulangan dampak lingkungan dan pencegaha dampak kebakaran lahan dan kebun;
8. pengendalian penanggulangan potensi terjadinya kekeringan, banjir, titik api, kebakaran lahan dan kebum
9. pengendalian koordinasi teknis perlindungan tanaman perkebunan;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan tanaman perkebunan; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
12. **Bidang Pengembangan SDM**

Bidang Pengembangan SDM mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

5.1 Kelompok Sub-substansi Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan.

Kelompok Sub-substansi Peningkatan Sumber Daya Manusia, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan;
3. pengendalian identifikasi kebutuhan pelatihan bagi penyuluh pertanian, perkebunan dan peternakan;
4. pengendalian pelaksanaan sekolah lapang atau pelatihan bagi petani;
5. pengendalian pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan;
6. pengendalian pelaksanaan pendampingan pemanfaatan teknologi pertanian;
7. pengendalian penyusunan dan pelaksanaan programa penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan;
8. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Kelompok Sub-substansi Kelembagaan Petani mempunyai tugas mengendalikan pemberdayaan kelembagaan petani.

Kelompok Sub-substansi Kelembagaan Petani, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan kelembagaan petani;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pemberdayaan kelembagaan petani;
3. pengendalian pembinaan kelembagaan kelompok tani usaha bidang pertanian, perkebunan dan peternakan;
4. pengendalian penyusunan database kelembagaan petani;
5. pengendalian pembinaan kemitraan dan kerjasama pembiayaan;
6. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.3 Kelompok Sub-substansi Sarana Prasarana Perizinan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan sarana prasarana perizinan pertanian.

Kelompok Sub-substansi Sarana Prasarana Perizinan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sarana prasarana perizinan pertanian;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan sarana prasarana perizinan pertanian;
3. pengendaliaan pembiayaan operasional penyuluh pertanian, perkebunan dan peternakan;
4. pengendalian ketersediaan sarana prasarana penyuluh pertanian, perkebunan dan peternakan;
5. pengendalian pengelolaan rekomendasi perizinan usaha pertanian, perkebunan dan peternakan;
6. pengendalian pengelolaan rekomendasi peredaran ternak keluar/ masuk kabupaten;
7. pengendalian pengelolaan rekomendasi peredaran benih;
8. pengendalian pengelolaan rekomendasi peredaran pupuk dan pestisida;
9. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan sarana prasarana perizinan pertanian;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sarana prasarana perizinan pertanian; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
12. **Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian**

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

6.1 Kelompok Sub-substansi Perluasan dan Pengelolaan Lahan mempunyai tugas mengendalikan perluasan dan pengelolaan lahan.

Kelompok Sub-substansi Perluasan dan Pengelolaan Lahan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis perluasan dan pengelolaan lahan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional perluasan dan pengelolaan lahan;
3. pengendalian penyusunan basis data lahan;
4. pengendalian pemanfaatan lahan dan alih fungsi lahan;
5. pengendalian optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan;
6. pengendalian perluasan kawasan tanaman pangan;
7. pengendalian perluasan kawasan pertanian, perkebunan dan peternakan;
8. pengendalian pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi jalan usaha tani kawasan tanaman pangan;
9. pengendalian koordinasi teknis perluasan dan pengelolaan lahan;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan perluasan dan pengelolaan lahan; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.2 Kelompok Sub-substansi Pengelolaan Air Irigasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan air irigasi.

Kelompok Sub-substansi Pengelolaan Air Irigasi, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan air irigasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan air irigasi;
3. pengendalian pengembangan jaringan dan optimasi air;
4. pengendalian pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha tani;
5. pengembangan sumber sumber mata air kawasan tanaman pangan dan hortikultura;
6. pengendalian pelaksanaan pembangunan peningkatan sarana prasarana sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya;
7. pengendalian pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan kontruksi sarana prasarana sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya; pengendalian koordinasi teknis pengelolaan air irigasi;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan air irigasi; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.3 Kelompok Sub-substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.

Kelompok Sub-substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
3. pengendalian pemanfaatan pupuk organik dan pembenah tanah;
4. pengendalian pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan pupuk anorganik;
5. pengendalian pemanfaatan pupuk anorganik;
6. pengendalian pemanfaatan pestisida;
7. pengendalian pelaksanaan pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida;
8. pengendalian pengembangan alat dan mesin pertanian;
9. pengendalian pelaksanaan pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian;
10. pengendalian pelayanan alat dan mesin pertanian;
11. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
12. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
14. **Bidang Ketahanan Pangan**

Bidang Ketahanan Pangan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

7.1 Kelompok Sub-substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan.

Kelompok Sub-substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan;
3. pengendalian pelaksanaan analisis ketersediaan pangan;
4. pengendalian pengembangan sumber daya pangan;
5. pengendaliam analisis akses pangan;
6. pengendalian pemanfatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
7. pengendalian pengembangan akses pangan;
8. pengendalian analisis kerawanan pangan;
9. pengendalian penanggulangan kerawanan pangan;
10. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan;
11. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7.2 Kelompok Sub-substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan.

Kelompok Sub-substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan;
3. pengendalian pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
4. pengendalian pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi konsumsi pangan;
5. pengendalian pelaksanaan penganekaragaman dan pengembangan pangan lokal;
6. pengendalian pelaksanaan promosi penganekaragaman pangan;
7. pengendalian pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;
8. pengendalian perkarantinaan pangan asal hewan dan nabati;
9. pengendalian pelaksanaan analisis konsumsi pangan;
10. pengendalian penyusunan peta pola konsumsi pangan dan potensi sumberdaya pangan lokal;
11. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan;
12. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7.3 Kelompok Sub-substansi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan distribusi dan harga pangan.

Kelompok Sub-substansi Distribusi dan Harga Pangan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan distribusi dan harga pangan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan distribusi dan harga pangan;
3. pengendalian analisis distribusi dan akses pangan;
4. pengendalian pengelolaan kelembagaan distribusi pangan;
5. pengendalian analisis harga pangan produsen;
6. pengendalian analisis harga pangan konsumen;
7. pengendalian sistem informasi pemasaran hasil pertanian
8. pengendalian akses pangan;
9. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan distribusi dan harga pangan;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan distribusi dan harga pangan; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**XI. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

1. **Sekretariat**

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

1.1 Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
3. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
4. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
5. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
6. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
7. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
8. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
9. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
11. **Bidang Industri**

Bidang Industri mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-substansi Industri Makanan dan Minuman mempunyai tugas mengendalikan pengembangan dan pengelolaan industri makanan dan minuman.

Kelompok Sub-substansi Industri Makanan dan Minuman menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan industri makanan dan minuman;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan dan pengelolaan industri makanan dan minuman;
3. pengendalian pengembangan sumber daya manusia industri makanan dan minuman;
4. pengendalian optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku industri makanan dan minuman;
5. pengendalian pengembangan pemanfaatan sumberdaya teknologi industri makanan dan minuman;
6. pengendalian pengembangan sistem informasi industri makanan dan minuman
7. pengendalian pengembangan perwilayahan industri makanan dan minuman
8. pengendalian fasilitasi kerjasama kemitraan dan pengembangan klaster industri makanan dan minuman
9. pengendalian pengembangan produk, desain dan kemasan industri makanan dan minuman
10. pengendalian fasilitasi pengembangan jaringan promosi dan pemasaran produk industri makanan dan minuman;
11. pengendalian fasilitasi penyediaan pembiayaan bagi industri makanan dan minuman
12. pengendalian pelayanan rekomendasi terkait pertimbangan teknis perizinan kegiatan usaha industri makanan dan minuman;
13. pengendalian pengembangan standar produk industri makanan dan minuman dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)
14. pengendalian koordinasi teknis pengembangan dan pengelolaan industri makanan dan minuman;
15. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pengelolaan industri makanan dan minuman; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Industri Non Makanan dan Minuman mempunyai tugas mengendalikan pengembangan dan pengelolaan industri tekstil, pakaian jadi, furniture, anyaman, dan industri non makanan dan minuman lainnya.

Kelompok Sub-substansi Industri Non Makanan dan Minuman menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan industri tekstil, pakaian jadi, furniture, anyaman, dan industri non makanan dan minuman lainnya;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan dan pengelolaan industri tekstil, pakaian jadi, furniture, anyaman, dan industri non makanan dan minuman lainnya;
3. pengendalian pengembangan sumber daya manusia industri tekstil, pakaian jadi, furniture, anyaman, dan industri non makanan dan minuman lainnya;
4. pengendalian optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku industri tekstil, pakaian jadi, furniture, anyaman, dan industri non makanan dan minuman lainnya;
5. pengendalian pengembangan pemanfaatan sumberdaya teknologi industri tekstil, pakaian jadi, furniture, anyaman, dan industri non makanan dan minuman lainnya;
6. pengendalian pengembangan sistem informasi industri tekstil, pakaian jadi, furniture, anyaman, dan industri non makanan dan minuman lainnya
7. pengendalian pengembangan perwilayahan industri tekstil, pakaian jadi, furniture, anyaman, dan industri non makanan dan minuman lainnya
8. pengendalian fasilitasi kerjasama kemitraan dan pengembangan klaster industri tekstil, pakaian jadi, furniture, anyaman, dan industri non makanan dan minuman lainnya
9. pengendalian pengembangan produk, desain dan kemasan industri tekstil, pakaian jadi, furniture, anyaman, dan industri non makanan dan minuman lainnya
10. pengendalian fasilitasi pengembangan jaringan promosi dan pemasaran produk industri tekstil, pakaian jadi, furniture, anyaman, dan industri non makanan dan minuman lainnya;
11. pengendalian fasilitasi penyediaan pembiayaan bagi industri tekstil, pakaian jadi, furniture, anyaman, dan industri non makanan dan minuman lainnya
12. pengendalian pelayanan rekomendasi terkait pertimbangan teknis perizinan kegiatan usaha tekstil, pakaian jadi, furniture, anyaman, dan industri non makanan dan minuman lainnya;
13. pengendalian pengembangan standar produk industri makanan dan minuman dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI);
14. pengendalian koordinasi teknis pengembangan dan pengelolaan industri tekstil, pakaian jadi, furniture, anyaman, dan industri non makanan dan minuman lainnya;
15. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pengelolaan industri tekstil, pakaian jadi, furniture, anyaman, dan industri non makanan dan minuman lainnya; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
17. **Bidang Perdagangan**

Bidang Perdagangan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

3.1 Kelompok Sub-substansi Pembinaan Usaha Perdagangan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembinaan usaha perdagangan.

Kelompok Sub-substansi Pembinaan Usaha Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan usaha perdagangan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembinaan usaha perdagangan;
3. pengendalian pembinaan kelompok pelaku usaha perdagangan dalam daerah skala kecil dan menengah;
4. pengendalian pelaksanaan operasi pasar, pasar murah maupun upaya lainnya untuk menjaga stabilisasi harga serta menjamin kelancaran pasokan dan distribusi komoditas perdagangan;
5. pengendalian pemantauan, analisa dan publikasi informasi perkembangan harga komoditas dan ketersediaannya;
6. pengendalian pemberian keterangan/rekomendasi terkait pertimbangan teknis perizinan kegiatan usaha perdagangan;
7. pengendalian fasilitasi pengembangan jaringan perdagangan antar daerah dan luar negeri;
8. pengendalian fasilitasi promosi, pameran dan misi dagang produk perdagangan skala nasional dan internasional;
9. pengendalian sistem informasi perdagangan Dalam Daerah;
10. pengendalian sistem informasi ekspor impor meliputi data potensi produk dan negara tujuan ekspor serta neraca perdagangan ekspor impor;
11. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pembinaan usaha perdagangan;
12. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan usaha perdagangan; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-substansi Sarana Prasarana Perdagangan mempunyai tugas mengendalikan pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana perdagangan.

Kelompok Sub-substansi Sarana Prasarana Perdagangan menyelenggarakn fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana perdagangan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana perdagangan;
3. pengendalian penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana pasar rakyat;
4. pengendalian pengelolaan pasar rakyat;
5. pengendalian pemeliharaan bangunan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar rakyat;
6. pengendalian penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pergudangan;
7. pengendalian pengelolaan, penataan dan pengembangan Sistem Resi Gudang;
8. pengendalian koordinasi teknis pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana perdagangan;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana perdagangan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
11. **Bidang Standarisasi Perlindungan Konsumen**

Bidang Standarisasi Perlindungan Konsumen mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

4.1 Kelompok Sub-substansi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan perlindungan konsumen.

Kelompok Sub-substansi Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan perlindungan konsumen;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan perlindungan konsumen;
3. pengendalian pelaksanaan pemenuhanstandar produk industri, sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan sertifikasi HALAL;
4. pengendalian perlindungan konsumen terhadap layanan purna jual;
5. pengendalian promosi dan pembinaan terhadap konsumen untuk menjadi konsumen cerdas;
6. pengendalian fasilitasi perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen bekerjasama dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
7. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan perlindungan konsumen;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan konsumen; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Kelompok Sub-substansi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa.

Kelompok Sub-substansi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengawasan peredaran barang dan jasa;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengawasan peredaran barang dan jasa;
3. pengendalian pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa sesuai standar mutu dan label kadaluarsa;
4. pengendalian pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa sesuai pengiklanan;
5. pengendalian pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa sesuai dengan cara penjualan melalui penawaran, promosi dan pemberian hadiah yang memuat pernyataan tidak benar atau mengelabui atau menyesatkan;
6. Pengawasan penjualan melalui obral atau lelang yang mengelabui/menyesatkankonsumen;
7. pengendalian pengawasan pelayanan purna jual berkaitan tersedia tidaknya suku cadang dan/atau fasilitas purna jual/perbaikan dan tidak ada atau tidak terpenuhinya jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan;
8. pengendalian pelaksanaan pembinaan pelaku usaha perdagangan dalam mewujudkan tertib tata niaga;
9. pengendalian tindak lanjut hasil operasi pengawasan peredaran barang da jasa;
10. pengendalian koordinasi teknis pengawasan peredaran barang dan jasa;
11. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengawasan peredaran barang dan jasa; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
13. **Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

5.1 Kelompok Sub-substansi Koperasi mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi.

Kelompok Sub-substansi Koperasi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi;
3. pengendalian pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi;
4. pengendalian pelayanan pembentukan, rekomendasi pengesahan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi
5. pengendalian fasilitasi advokasi dan mediasi penyelesaian permasalahan perkoperasian;
6. pengendalian pelaksanaan bimbingan dan pengawasan akuntabilitas koperasi;
7. pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeringkatan koperasi;
8. pengendalian pelaksanaan dan penyuluhan sumber daya manusia koperasi;
9. pengendalian pemberdayaan dan bimbingan usaha koperasi;
10. pengendalian fasilitasi kerjasama usaha koperasi antar lembaga koperasi dan lembaga lainnya;
11. pengendalian fasilitasi penguatan permodalan koperasi;
12. pengendalian pelayanan penerbitan rekomendasi izin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi;
13. pengendalian koordinasi teknis pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi;
14. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Kelompok Sub-substansi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas mengendalikan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah.

Kelompok Sub-substansi Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan, pengembangan dan pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah;
3. pengendalian pemberdayaan dan bimbingan teknis usaha Kecil dan Menengah;
4. pengendalian kerjasama antar usaha kecil menengah dengan lembaga lainnya;
5. pengendalian pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah;
6. pengendalian fasilitasi penguatan permodalan dan sarana prasarana usaha kecil dan menengah;
7. pengendalian fasilitasi promosi produk-produk usaha kecil dan menengah;
8. pengendalian penyediaan sarana dan prasarana usaha kecil menengah;
9. pengendalian koordinasi teknis pembinaan, pengembangan dan pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**XII. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

1. **Sekretariat**

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

1.1 Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
3. pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
4. pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
5. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
6. pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
7. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
8. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
9. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
3. pengendalian administrasi keuangan;
4. pengendalian perbendaharaan;
5. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
6. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
7. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2. Bidang Perikanan Budidaya**

Bidang Perikanan Budidaya mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-substansi Produksi Budidaya mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan produksi budidaya.

Kelompok Sub-substansi Produksi Budidaya menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan produksi budidaya;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan produksi budidaya;
3. pengendalian pengelolaan produksi perikanan budidaya;
4. pengendalianpenyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
5. pengendalian pengembangan usaha budidaya ikan;
6. pengendalian pelayanan rekomendasi izin usaha budidaya perikanan;
7. pengendalian standarisasi dan sertifikasi pengelolaan usaha budidaya perikanan;
8. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan produksi budidaya;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan produksi budidaya; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Sarana dan Prasarana Produksi mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi.

Kelompok Sub-substansi Sarana dan Prasarana Produksi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi;
3. pengendalian pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi;
4. pengendalian pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
5. pengendalian pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan;
6. pengendalian koordinasi teknis pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Kelompok Sub-substansi Karantina dan Pengendalian Sumber Daya Ikan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan karantina dan pengendalian sumber daya ikan.

Kelompok Sub-substansi Karantina dan Pengendalian Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan karantina dan pengendalian sumber daya ikan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan karantina dan pengendalian sumber daya ikan;
3. pengendalian pembenihan ikan dan karantina;
4. pengendalian hama dan penyakit ikan;
5. pengendalian perlindungan lingkungan budidaya;
6. pengendalian perlindungan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan;
7. pengendalian penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu;
8. pengendalian pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih Ikan
9. pengendalian pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;
10. pengendalian pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
11. pengendalian pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudi daya ikan
12. pengendalian koordinasi teknis karantina dan pengendalian sumber daya ikan;
13. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan karantina dan pengendalian sumber daya ikan;dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bidang Perikanan Tangkap dan Pesisir**

Bidang Perikanan Tangkap dan Pesisir mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

3.1 Kelompok Sub-substansi Produksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan peningkatan produksi perikanan tangkap.

Kelompok Sub-substansi Produksi Perikanan Tangkap, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan produksi perikanan tangkap;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan peningkatan produksi perikanan tangkap;
3. pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah perairan kewenangan kabupaten
4. pengendalian pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten
5. pengendalian pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten
6. pengendalian pembinaan teknis penangkapan ikan;
7. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan peningkatan produksi perikanan tangkap;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan produksi perikanan tangkap; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-substansi Sarana dan Prasarana Penangkapan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan.

Kelompok Sub-substansi Sarana dan Prasarana Penangkapan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan;
3. pengendalian fasilitasi penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan;
4. pengendalian fasilitasi produktivitas alat tangkap dan armada kapal penangkap ikan;
5. pengendalian pendaftaran kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sesuai kewenangan daerah;
6. pengendalian pengelolaan rekomendasi ijin alat penangkapan ikan;
7. pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan tempat pelelangan ikan;
8. pengendalian pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT;
9. pengendalian penataan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan;
10. pengendalian koordinasi teknis pengembangan sarana dan prasarana penangkapan;
11. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Kelompok Sub-substansi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas mengendalikan pengembangan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kelompok Sub-substansi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis pengembangan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengembangan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. pengendalian rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka menjaga daya dukung lingkungan;
4. pengendalian tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan;
5. pengendalian pembinaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pelestarian sumberdaya perikanan;
6. pengendalian fasiltiasi mitigasi bencana dan kerusakan lingkungan pesisir di wilayah perairan kewenangan kabupaten;
7. pengendalian koordinasi teknis pengembangan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
10. **Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

4.1 Kelompok Sub-substansi Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengembangan usaha pengolahan ikan.

Kelompok Sub-substansi Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan usaha pengolahan ikan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengembangan usaha pengolahan ikan;
3. pengendalian pelaksanaan pemberdayaan, bimbingan dan pembinaan usaha pengolahan ikan
4. pengendalian fasilitasi teknologi pengolahan ikan;
5. pengendalian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha perikanan;
6. pengendalian fasilitasi permodalan, promosi dan investasi di bidang perikanan;
7. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pengembangan usaha pengolahan ikan;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan usaha pengolahan ikan;dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Kelompok Sub-substansi Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas mengendalikan pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan.

Kelompok Sub-substansi Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan;
3. pengendalian pelaksanaan pameran promosi komoditi hasil perikanan;
4. pengendalian pelaksanaan pemantauan harga pasar komoditi hasil perikanan;
5. pengendalian mutu pengolahan hasil perikanan memenuhi standar kesehatan dan ekonomi;
6. pengendalian peningkatan jangkauan pemasaran hasil perikanan;
7. pengendalian koordinasi teknis pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Kelompok Sub-substansi Penguatan Daya Saing Produk dan Non Produk Perikanan mempunyai tugas mengendalikan penguatan daya saing produk dan non produk perikanan.

Kelompok Sub-substansi Penguatan Daya Saing Produk dan Non Produk Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis penguatan daya saing produk dan non produk perikanan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penguatan daya saing produk dan non produk perikanan;
3. pengendalian fasilitasi kemasan produk olahan hasil perikanan;
4. pengendalian pelaksanaan standarisasi produk dan non produk perikanan;
5. pengendalian fasilitasi kerjasama industri pengolahan produk dan non produk perikanan;
6. pengendalian fasilitasi pemanfaatan teknologi industri pengolahan;
7. pengendalian pemetaan kebutuhan pasar terhadap hasil pengolahan produk dan non produk perikanan;
8. pengendalian koordinasi teknis penguatan daya saing produk dan non produk perikanan;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan penguatan daya saing produk dan non produk perikanan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
11. **Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan**

Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

5.1 Kelompok Sub-substansi Informasi dan Inovasi Teknologi Perikanan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengelolaan informasi dan inovasi teknologi perikanan.

Kelompok Sub-substansi Informasi dan Inovasi Teknologi Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan informasi dan inovasi teknologi perikanan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengelolaan informasi dan inovasi teknologi perikanan;
3. pengendalian pengelolaan informasi dan inovasi teknologi budidaya perikanan dan perikanan tangkap;
4. pengendalian fasilitasi rekayasa teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
5. pengendalian penerapan teknologi tepat guna dalam pembudidayaan ikan;
6. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pengelolaan informasi dan inovasi teknologi perikanan;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan informasi dan inovasi teknologi perikanan;dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Kelompok Sub-substansi Pembinaan Kelembagaan dan Pendataan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pendataan.

Kelompok Sub-substansi Pembinaan Kelembagaan dan Pendataan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pendataan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pendataan;
3. pengendalian pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan kelompok masyarakat perikanan;
4. pengendalian pelaksanaan pendataan sumber daya perikanan;
5. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pendataan;
6. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pendataan;dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.3 Kelompok Sub-substansi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas mengendalikan pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan.

Kelompok Sub-substansi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan;
3. pengendalian pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
4. pengendalian pembinaan kelompok pengawas perikanan berbasis masyarakat;
5. pengendalian koordinasi teknis pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan;
6. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan;dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**XIII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

1. **Sekretariat**

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

1.1 Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.

Kelompok Sub Substansi Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
3. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
4. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
5. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pengendalian anggaran;
6. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
7. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
8. Pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
9. Pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Satuan Kerja.

Kelompok Sub-Substansi Keuangan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
3. pengendalian administrasi keuangan;
4. pengendalian perbendaharaan;
5. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
6. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
7. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
10. **Bidang Penanaman Modal**

Bidang Penanaman Modal mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-substansi Perencanaan, Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas mengendalikan perencanaan, penyelenggaraan Sistem Informasi dan pengawasan penanaman modal.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan, Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pengawasan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis perencanaan, penyelenggaraan Sistem Informasi dan pengawasan penanaman modal;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional perencanaan, penyelenggaraan Sistem Informasi dan pengawasan penanaman modal;
3. pengendalian perencanaan penanaman modal;
4. pengendalian penanaman modal;
5. pengendalian sistem informasi penanaman modal;
6. pengendalian penyusunan peta potensi investasi;
7. pengawasan penanaman modal;
8. pengendalian pengumpulan data;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan, pengendalian Sistem Informasi dan pengawasan penanaman modal;dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas mengendalikan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.

Kelompok Sub-substansi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
3. pengendalian penyiapan paket promosi penanaman modal;
4. pengendalian promosi penanaman modal dalam negeri dan luar negeri;
5. pengendalian koordinasi teknis pengembangan iklim investasi;
6. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. **Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Perizinan, dan Non Perizinan**

Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Perizinan, dan Non Perizinan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

3.1 Kelompok Sub-substansi Layanan Informasi Pengaduan, Konsultasi, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengendalikan pelayanan informasi pengaduan, konsultasi, pengawasan dan penyuluhan perizinan dan non perizinan.

Kelompok Sub-substansi Layanan Informasi Pengaduan, Konsultasi, Pengawasan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelayanan informasi pengaduan, konsultasi, pengawasan dan penyuluhan perizinan dan non perizinan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelayanan pelayanan informasi pengaduan, konsultasi, pengawasan dan penyuluhan perizinan dan non perizinan;
3. pengendalian penyiapan paket informasi perizinan dan non perizinan;
4. pengendalian sistem informasi perizinan dan non perizinan baik melalui media ekektronik dan maupun non elektronik;
5. pengendalian pelayanan pengaduan dan keluhan;
6. pengendalian survei kepuasan pelayanan;
7. pengendalian pelayanan konsultasi;
8. pengendalian pengawasan pelayanan perizinan dan non perizinan;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan informasi pengaduan, konsultasi, pengawasan dan penyuluhan perizinan dan non perizinan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-substansi Pelayanan Pendaftaran, Verifikasi dan Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas mengendalikan pelayanan pendaftaran, verifikasi dan pelaporan perizinan dan non perizinan.

Kelompok Sub-substansi Pelayanan Pendaftaran, Verifikasi dan Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelayanan pendaftaran, verifikasi dan pelaporan perizinan dan non perizinan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelayanan pendaftaran, verifikasi dan pelaporan perizinan dan non perizinan;
3. pengendalian pelayanan pendaftaran perizinan;
4. pengendalian pelayanan pendaftaran non perizinan;
5. pengendalian verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan perizinan dan non perizinan
6. pengendalian pelayanan penyampaian dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan;
7. pengendalian pelayanan pembayaran retribusi perizinan dan non perizinan;
8. pengendalian pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan pendaftaran, verifikasi dan pelaporan perizinan dan non perizinan;dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
11. **Bidang Peninjauan dan Penetapan Sektor A**

Bidang Peninjauan dan Penetapan Sektor A mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

4.1 Kelompok Sub-substansi Peninjauan Sektor A mempunyai tugas mengendalikan peninjauan permohonan perizinan dan non perizinan sektor A.

Kelompok Sub-subtansi Peninjauan Sektor A menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis peninjauan permohonan perizinan dan non perizinan sektor A;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peninjauan permohonan perizinan dan non perizinan sektor A;
3. pengendalian tindak lanjut pengelolaan dokumen perizinan dan non perizinan sektor A yang telah memenuhi syarat administratif;
4. pengendalian pengendalian rapat-rapat teknis sebagai tindak lanjut permohonan perizinan dan non perizinan sektor A;
5. pengendalian koordinasi teknis dengan tim teknis terkait peninjauan lapangan atas permohonan perizinan dan non perizinan sektor A;
6. pengendalian koordinasi teknis penerbitan rekomendasi teknis dan kelengkapan administrasi teknis lainnya sebagai dasar penerbitan perizinan;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan peninjauan perizinan dan non perizinan sektor A; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Kelompok Sub-substansi Penetapan Sektor A mempunyai tugas mengendalikan proses administrasi penetapan dan pengendalian dokumentasi perizinan dan non perizinan sektor A.

Kelompok Sub-subtansi Penetapan Sektor A menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis penetapan perizinan dan non perizinan sektor A;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penetapan perizinan dan non perizinan sektor A;
3. pengendalian pemrosesan administrasi penetapan perizinan dan non perizinan sektor A;
4. pengendalian dokumentasi perizinan dan non perizinan sektor A;
5. pengendalian pengelolaan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
6. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan penetapan perizinan dan non perizinan sektor A; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. **Bidang Peninjauan dan Penetapan Sektor B**

Bidang Peninjauan dan Penetapan Sektor B mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

5.1 Kelompok Sub-substansi Peninjauan Sektor B mempunyai tugas mengendalikan peninjauan permohonan perizinan dan non perizinan sektor B.

Kelompok Sub-substansi Peninjauan Sektor B menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis peninjauan permohonan perizinan dan non perizinan sektor B;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peninjauan permohonan perizinan dan non perizinan sektor B;
3. pengendalian pengelolaan dokumen perizinan dan non perizinan sektor B yang telah memenuhi syarat administratif;
4. pengendalian pengendalian rapat-rapat teknis sebagai tindak lanjut permohonan perizinan dan non perizinan sektor B;
5. pengendalian koordinasi teknis dengan tim teknis terkait peninjauan lapangan atas permohonan perizinan dan non perizinan sektor B;
6. pengendalian koordinasi teknis penerbitan rekomendasi teknis dan kelengkapan administrasi teknis lainnya sebagai dasar penerbitan perizinan;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan peninjauan perizinan dan non perizinan sektor A; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Kelompok Sub-substansi Penetapan Sektor B mempunyai tugas mengendalikan proses administrasi penetapan dan pengendalian dokumentasi perizinan dan non perizinan sektor B.

Kelompok Sub-substansi Penetapan Sektor B menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis penetapan perizinan dan non perizinan sektor B;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penetapan perizinan dan non perizinan sektor B;
3. pengendalian pemrosesan administrasi penetapan perizinan dan non perizinan sektor B;
4. pengendalian dokumentasi perizinan dan non perizinan sektor B;
5. pengendalian pengelolaan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
6. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan penetapan perizinan dan non perizinan sektor B; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**XIV. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

1. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

1.1 Kelompok Sub-substansi Penataan dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan penataan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan.

Kelompok Sub-substansi Penataan dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penataan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan penataan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan;
3. pengendalian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
4. pengendalian pemberdayaan masyarakat dan kelompok sosial budaya desa;
5. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan penataan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan;
6. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan;dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Kelompok Sub-substansi Perencanaan Pembangunan Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan Pembangunan Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
3. pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;
4. pengendalian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
5. pengendalian pengembangan kawasan perdesaan;
6. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. **Bidang Pemerintahan Desa**

Bidang Pemerintrahan Desa mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-substansi Penataan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kelompok Sub-substansi Penataan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. pengendalian penataan administrasi pemerintahan desa;
4. pengendalian pembinaan kelembagaan pemerintahan desa;
5. pengendalian penyusunan peraturan desa;
6. pengendalian pembinaan pengelolaan aset desa;
7. pengendalian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
8. pengendalian sistem informasi pemerintahan desa;
9. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kerjasama Desa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur dan kerjasama desa.

Kelompok Sub-substansi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kerjasama Desa menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengembangan kapasitas aparatur dan kerjasama desa;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan kapasitas aparatur dan kerjasama desa;
3. pengendalian pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar, studi banding dan kegiatan pengembangan lainnya
4. pengendalian pelaksanaan kerjasama desa;
5. pengendalian pembinaan pengelolaan keuangan desa;
6. pengendalian koordinasi teknis pengembangan kapasitas aparatur dan kerjasama desa;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kapasitas aparatur dan kerjasama desa; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
9. **Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna**

Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

3.1 Kelompok Sub-substansi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan usaha ekonomi Desa.

Kelompok Sub-substansi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha ekonomi Desa;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan usaha ekonomi Desa;
3. pengendalian pelaksanaan penguatan usaha ekonomi desa;
4. pengendalian pembinaan Badan Usaha Desa;
5. pengendalian koordinasi teknis pengembangan usaha ekonomi Desa
6. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi Desa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-substansi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bantuan hukum.

Kelompok Sub-substansi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, menyelenggarakan fungsi :

* 1. penyusunan petunjuk teknis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  3. pengendalian pelaksanaan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  4. pengendalian koordinasi teknis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  5. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**XV. DINAS SOSIAL**

1. **Sekretariat**

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

1.1 Kelompok Sub-substansi Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
3. pengendalian administrasi keuangan;
4. pengendalian perbendaharaan;
5. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
6. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
7. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan
8. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
9. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
10. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
11. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
12. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
13. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
14. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-substansi Seksi Perlindungan Sosial mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan perlindungan sosial.

Kelompok Sub-substansi Seksi Perlindungan Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan perlindungan sosial;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan perlindungan sosial;
3. pengendalian pelaksanaan pemetaan sosial dan penguatan sumber daya;
4. pengendalian penanganan korban bencana sosial, ekonomi dan politik
5. pengendalian pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial;
6. pengendalian tata kelola dan pemanfaatan logistik;
7. pengendalian pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
8. pengendalian penanganan korban bencana alam dan sosial;
9. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan perlindungan sosial;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan sosial; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan jaminan sosial.

Kelompok Sub-substansi Seksi Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jaminan sosial;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan jaminan sosial;
3. pengendalian pengelolaan kepesertaan jaminan sosial;
4. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan jaminan sosial dan bantuan fakir miskin;
5. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan jaminan sosial dan bantuan fakir miskin; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bidang Rehabilitasi Sosial**

Bidang Rehabilitasi Sosial mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

3.1 Kelompok Sub-substansi Seksi Sosial, Lansia dan Anak mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan rehabilitasi sosial, lansia dan anak.

Kelompok Sub-substansi Seksi Sosial, Lansia dan Anak menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial, lansia dan anak;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan rehabilitasi sosial, lansia dan anak;
3. pengendalian data dan sistem informasi kesejahteraan sosial anak dan lansia;
4. pengendalian  pelayanan rehabilitasi sosial anak balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak disabilitas yang berkebutuhan khusus;
5. pengendalian  pelayanan rehabilitasi sosial pengangkatan Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Calon Anak Angkat (CAA);
6. pengendalian rehabilitasi sosial lansia, meliputi kelembagaan, perlindungan dan aksesbilitas dan pelayanan sosial di dalam dan di luar panti;
7. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial, lansia dan anak;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial, lansia dan anak; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-substansi Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan Panti mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial, disabilitas dan panti.

Kelompok Sub-substansi Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan Panti menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial, disabilitas dan panti;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial, disabilitas dan panti;
3. pengendalian pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
4. pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial tentang bekas warga binaan (eks. nara pidana), waria, korban perdagangan orang (KPO) dan pekerja emigran;
5. pengendalian pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza;
6. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial, disabilitas dan panti;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial, disabilitas dan panti; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
9. **Bidang Pemberdayaan Sosial**

Bidang Pemberdayaan Sosial mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

4.1 Kelompok Sub-substansi Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Fakir Miskin mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, bantuan stimulan dan fakir miskin.

Kelompok Sub-substansi Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, bantuan stimulan dan fakir miskin;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, bantuan stimulan dan fakir miskin;
3. pengendalian pelaksanaan pembinaan usaha kesejahteraan sosial peran keluarga meliputi keluarga muda mandiri, keluarga bermasalah sosial psikologis, wanita rawan sosial ekonomi dan keluarga rentan;
4. pengendalian pelaksanaan bimbingan sosial, pemberdayaan sosial dan pelayanan sosial bagi masyarakat yang berada di lingkungan kumuh;
5. pengendalian pelaksanaan bimbingan sosial, pemberdayaan sosial dan pelayanan sosial bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil/ komunitas adat terpencil (KAT);
6. pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan stimulan;
7. pengendalian pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat fakir miskin;
8. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, bantuan stimulan dan fakir miskin;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, bantuan stimulan dan fakir miskin; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Kelompok Sub-substansi Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

Kelompok Sub-substansi Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
3. pengendalian pengelolaan kelembagaan kepahlawanan dan keperintisan;
4. pengendalian pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan;
5. pengendalian pemberdayaan kesetiakawanan sosial;
6. pengendalian pengelolaan taman makam pahlawan;
7. pengendalian koordinasi teknis pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**XVI. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

1. **Sekretariat**

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

* 1. Kelompok Sub-substansi Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
3. pengendalian administrasi keuangan;
4. pengendalian perbendaharaan;
5. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
6. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
7. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan
8. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
9. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
10. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
11. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
12. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
13. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
14. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca**

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-substansi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan mempunyai tugas mengendalikan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah.

Kelompok Sub-substansi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
3. pengendalian pendataan, pembinaan dan pengembangan manajemen perpustakaan;
4. pengendalian pendataan pembinaan dan pengembangan kemampuan teknis tenaga perpustakaan;
5. pengendalian penilaian angka kredit pustakawan;
6. pengendalian koordinasi teknis pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai tugas mengendalikan pembudayaan kegemaran membaca.

Kelompok Sub-substansi Pembudayaan Kegemaran Membaca menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pembudayaan kegemaran membaca;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembudayaan kegemaran membaca;
3. pengendalian pelaksanaan promosi dan publikasi budaya gemar membaca;
4. pengendalian kegiatan pembudayaan gemar membaca;
5. pengendalian koordinasi teknis pembudayaan gemar membaca;
6. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembudayaan gemar membaca; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bidang Pengolahan, Pelestarian dan Pelayanan**

Bidang Pengolahan, Pelestarian dan Pelayanan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

3.1 Kelompok Sub-substansi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka mempunyai tugas mengendalikan pengolahan dan pelestarian bahan pustaka.

Kelompok Sub-substansi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengolahan dan pelestarian bahan pustaka;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengolahan dan pelestarian bahan pustaka;
3. pengendalian penyelenggaraan layanan perpustakaan dengan perangkat daerah, BUMD, instansi terkait dan masyarakat;
4. pengendalian penyelenggaraan penyusunan deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, dan penyelesaian fisik bahan perpustakaan;
5. pengendalian pelaksanaan verifikasi, validasi, pemasukan data bahan pustaka;
6. pengendalian penyusunan literatur sekunder;
7. pengendalian konservasi dan pelestarian bahan pustaka;
8. pengendalian koordinasi teknis pengolahan dan pelestarian bahan pustaka;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengolahan dan pelestarian bahan pustaka; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
    1. Kelompok Sub-substansi Pelayanan Perpustakaan mempunyai tugas mengendalikan pelayanan perpustakaan.

Kelompok Sub-substansi Pelayanan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis pelayanan perpustakaan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelayanan perpustakaan;
3. pengendalian layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan referensi, layanan pinjam antar perpustakaan;
4. pengendalian penyusunan statistik perpustakaan;
5. pengendalian stock opname dan penyiangan bahan perpustakaan (*weeding*);
6. pengelolaan dan pengembangan perangkat keras dan lunak sistem informasi layanan perpustakaan;
7. pengendalian pengembangan dan pengelolaan kerja sama perpustakaan;
8. pengendalian pelayanan perpustakaan keliling;
9. pengendalian pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan perpustakan;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan perpustakan; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**4. Bidang Kearsipan**

Bidang Kearsipan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

* 1. Kelompok Sub-substansi Pengelolaan Arsip mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan arsip daerah.

Kelompok Sub-substansi Pengelolaan Arsip menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan arsip daerah;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan arsip daerah;
3. pengendalian pengelolaan arsip dinamis dan statis
4. pengendalian jadwal retensi dan pemusnahan arsip
5. pengendalian penilaian dan penyusutan arsip dinamis;
6. pengendalian pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan;
7. pengendalian pemeliharaan dan perawatan arsip;
8. pengendalian penataan dan penyelamatan Arsip
9. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan arsip daerah;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan arsip daerah; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Kelompok Sub-substansi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Kearsipan.

Kelompok Sub-substansi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kearsipan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kearsipan;
3. pengendalian pelaksanaan pembinaan kearsipan pada Perangkat Daerah;
4. pengendalian pengawasan pengelolaan arsip pada perangkat daerah;
5. pengendalian koordinasi teknis pembinaan dan pengawasan kearsipan pada Perangkat Daerah;
6. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengawasan kearsipan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**XVII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

1. **Sekretariat**

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

1.1 Kelompok Sub-substansi Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
3. pengendalian administrasi keuangan;
4. pengendalian perbendaharaan;
5. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
6. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
7. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan
8. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
9. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
10. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
11. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
12. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
13. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
14. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan kajian dampak lingkungan.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
3. pengendalian  penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
4. pengendalian penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. pengendalian penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) lingkungan hidup;
6. pengendalian penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
7. pengendalian penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
8. pengendalian penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten;
9. pengendalian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, rekomendasi izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup)
10. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
11. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan kajian dampak lingkungan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Kelompok Sub-substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
3. pengendalian fasilitasi penerimaan dan tindak lanjut pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. pengendalian sosialisasi tata cara pengaduan dan pengembangan sistem informasi pengaduan lingkungan hidup;
5. pengendalian penyiapan bahan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
6. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Kelompok Sub-substansi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lingkungan hidup.

Kelompok Sub-substansi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lingkungan hidup;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lingkungan hidup;
3. pengendalian pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
4. pengendalian sosialisasi dan pendampingan penanaman nilai-nilai kearifan lokal tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
5. pengendalian pembinaan masyarakat tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
6. pengendalian kemitraan dengan dunia usaha, organisasi masyarakat dan pihak lainnya dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
7. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lingkungan hidup;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lingkungan hidup; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran**

Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

3.1 Kelompok Sub-substansi Pengelolaan Limbah mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengelolaan limbah.

Kelompok Sub-substansi Pengelolaan Limbah, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan limbah;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengelolaan limbah;
3. pengendalian penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
4. pengendalian pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
5. pengendalian pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
6. pengendalian pelaksanaan perizinan pengumpulan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan dalam satu Daerah Kabupaten;
7. pengendalian penguburan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis;
8. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pengelolaan limbah;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan limbah; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-substansi Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas mengendalikan Pencemaran.

Kelompok Sub-substansi Pengendalian Pencemaran, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pencemaran;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pencemaran;
3. pengendalian pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi serta pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;
4. pengendalian pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
5. pengendalian pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
6. pengendalian pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
7. pengendalian pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi serta pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
8. pengendalian penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan)
9. pengendalian koordinasi teknis pengendalian pencemaran;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pencemaran; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
12. **Bidang Kebersihan dan Pertamanan**

Bidang Kebersihan dan Pertamanan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

4.1 Kelompok Sub-substansi Kebersihan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan kebersihan dan persampahan lingkungan perkotaan.

Kelompok Sub-substansi Kebersihan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kebersihan dan persampahan lingkungan perkotaan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan kebersihan dan persampahan lingkungan perkotaan;
3. pengendalian kebersihan jalan-jalan protokol perkotaan;
4. pengendalian pengelolaan persampahan masyarakat dan dunia usaha di perkotaan;
5. pengendalian kebersihan dan timbunan sampah pada drainase primer di lingkungan perkotaan;
6. pengendalian pengembangan sistem pengelolaan kebersihan lingkungan hidup dan persampahan;
7. pengendalian peningkatan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan;
8. pengendalian peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan dunia usaha;
9. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan kebersihan dan persampahan lingkungan perkotaan;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kebersihan dan persampahan lingkungan perkotaan; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Kelompok Sub-substansi Pertamanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pertamanan perkotaan.

Kelompok Sub-substansi Pertamanan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pertamanan perkotaan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan pertamanan perkotaan;
3. pengendalian pengelolaan keindahan taman-taman kota;
4. pengendalian pengelolaan keindahan taman-taman median jalan di perkotaan;
5. pengendalian kemitraan dengan masyarakat perkotaan, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan pihak ketiga lainnya untuk mengelola keindahan lingkungan di sekitarnya;
6. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan pertamanan perkotaan;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pertamanan perkotaan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Kelompok Sarana dan Prasarana Persampahan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan.

Kelompok Sub-substansi Sarana dan Prasarana Persampahan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sarana dan prasarana persampahan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional sarana dan prasarana persampahan
3. pengendalian analisa kebutuhan sarana dan prasarana persampahan;
4. pengendalian penyediaan sarana dan prasarana persampahan;
5. pengendalian pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan;
6. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan sarana dan prasarana persampahan;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**XVIII. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

1. **Sekretariat**

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

1.1 Kelompok Sub-substansi Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
3. pengendalian administrasi keuangan;
4. pengendalian perbendaharaan;
5. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
6. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
7. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan
8. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
9. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
10. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
11. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
12. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
13. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
14. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-substansi Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas mengendalikan pelayanan informasi publik.

Kelompok Sub-substansi Pelayanan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis Pelayanan Informasi Publik;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional Pelayanan Informasi Publik;
3. pengendalian pengelolaan informasi publik;
4. pengendalian pelayanan informasi publik;
5. pengendalian pengelolaan citra positif pemerintah;
6. pengendalian hubungan media;
7. pengendalian jasa usaha komunikasi dan informasi dan kegiatan operasional usaha komunikasi;
8. pengendalian Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) milik Pemda maupun Non Pemda;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan informasi publik; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Pengelolaan Aspirasi Publik mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan aspirasi publik.

Kelompok Sub-substansi Pengelolaan Aspirasi Publik menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan aspirasi publik;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan aspirasi publik;
3. pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;
4. pengendalian pengelolaan aspirasi masyarakat;
5. pengendalian pengembangan sarana aspirasi publik;
6. pengendalian pengelolaan isu publik di media massa dan media sosial;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan aspirasi publik; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bidang Teknologi Informasi dan Persandian**

Bidang Teknologi Informasi dan Persandian mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

3.1 Kelompok Sub-substansi e-Government dan Persandian mempunyai tugas mengendalikan pengembangan e-Government dan tata kelola Persandian.

Kelompok Sub-substansi e-Government dan Persandian, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengembangan e-Government dan tata kelola Persandian;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan e-Government dan tata kelola Persandian;
3. pengendalian pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah;
5. pengendalian pelayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah daerah;
6. pengendalian pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
7. pengendalian pengembangan akses internet pemerintah dan publik;
8. pengendalian pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan e-Government dan tata kelola Persandian; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-substansi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas mengendalikan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.

Kelompok Sub-substansi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi;
3. pengendalian pengkajian terhadap kebutuhan piranti keras, piranti lunak, sistem jaringan dan aplikasi;
4. pengendalian pengembangan ekosistem TIK Smart City;
5. pengendalian pengembangan infrastuktur dasar data center dan disaster recovery center;
6. pengendalian peningkatan SDM teknologi informasi dan komunikasi;
7. pengendalian pengawasan menara telekomunikasi;
8. pengendalian pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**4. Bidang Statistik**

Bidang Statistik mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

4.1 Kelompok Sub-substansi Pengolahan Data Sektoral mempunyai tugas mengendalikan pengumpulan dan pengolahan data sektoral.

Kelompok Sub-substansi Pengolahan Data Sektoral, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengumpulan dan pengolahan data sektoral;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengumpulan dan pengolahan data sektoral;
3. pengendalian pengumpulan data sektoral;
4. pengendalian pengolahan data sektoral;
5. pengendalian koordinasi teknis pengumpulan dan pengolahan data statistik sektoral pemerintah daerah;
6. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengumpulan dan pengolahan data sektoral; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Kelompok Sub-substansi Kemitraan dan Penyajian Data Statistik mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kemitraan dan penyajian data Statistik.

Kelompok Sub-substansi Kemitraan dan Penyajian Data Statistik, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kemitraan dan penyajian data Statistik;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kemitraan dan penyajian data Statistik;
3. pengendalian pelaksanaan kemitraan statistik pemerintah daerah;
4. pengendalian visualisasi statistik pemerintah daerah;
5. pengendalian penyajian statistik pemerintah daerah;
6. pengendalian pengembangan sistem informasi statistik pemerintah daerah;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan dan penyajian data Statistik; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**XIX. DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

1. **Sekretariat**

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

1.1 Kelompok Sub-substansi Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
3. pengendalian administrasi keuangan;
4. pengendalian perbendaharaan;
5. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
6. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
7. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
9. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
10. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
11. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
12. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
13. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
14. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2. Bidang Perumahan**

Bidang Perumahan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-substansi Pengembangan dan Penataan Perumahan Formal mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengembangan dan penataan perumahan formal.

Kelompok Sub-substansi Pengembangan dan Penataan Perumahan Formal menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan dan penataan perumahan formal;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengembangan dan penataan perumahan formal;
3. pengendalian pendataan perumahan formal;
4. pengendalian fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana sarana dan utilitas perumahan formal;
5. pengendalian fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan Rumah Susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan rumah khusus beserta prasarana sarana dan utilitasnya;
6. pengendalian pelaksanaan subsidi kepemilikan perumahan formal;
7. pengendalian pelaksanaan fasilitasi pembangunan rumah untuk korban bencana;
8. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pengembangan dan penataan perumahan formal;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan penataan perumahan formal; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Pengembangan dan Penataan Perumahan Swadaya mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengembangan dan penataan perumahan swadaya.

Kelompok Sub-substansi Pengembangan dan Penataan Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan dan penataan perumahan swadaya;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengembangan dan penataan perumahan swadaya;
3. pengendalian pendataan perumahan swadaya;
4. pengendalian fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
5. pengendalian fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan swadaya;
6. pengendalian pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam mempermudah akses untuk mendapatkan dana stimulan pembangunan dan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
7. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pengembangan dan penataan perumahan swadaya;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan penataan perumahan swadaya; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bidang Permukiman**

Bidang Permukiman mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

3.1 Kelompok Sub-substansi Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman.

Kelompok Sub-substansi Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman;
3. pengendalian fasilitasi pemenuhan kebutuhan prioritas sarana dan prasarana kawasan permukiman konstruksi sederhana;
4. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman;
5. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-substansi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengembangan dan penataan kawasan permukiman.

Kelompok Sub-substansi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
3. pengendalian penetapan site plan pengembangan kawasan permukiman;
4. pengendalian penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
5. pengendalian pelaksanaan pendataan dan penetapan kawasan permukiman kumuh;
6. pengendalian penyusunan kebutuhan prioritas sarana prasarana kawasan permukiman;
7. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan penataan kawasan permukiman; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
10. **Bidang Pertanahan**

Bidang Pertanahan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

4.1 Kelompok Sub-substansi Survey, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas menyelenggarakan survey, pengukuran dan pemetaan tanah untuk fasilitas publik.

Kelompok Sub-substansi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis survey, pengukuran dan pemetaan tanah untuk fasilitas publik;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional survey, pengukuran dan pemetaan tanah untuk fasilitas publik;
3. pengendalian pelaksanaan survey kebutuhan tanah untuk fasilitas publik;
4. pengendalian pelaksanaan pengukuran tanah milik pemerintah daerah;
5. pengendalian pemetaan tanah milik pemerintah daerah;
6. pengendalian pelaksanaan pembebasan/ pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan publik;
7. pengendalian penerbitan rekomendasi izin lokasi sesuai kewenangan pemerintah daerah;
8. pengendalian koordinasi survey, pengukuran dan pemetaan tanah untuk fasilitas publik;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan survey, pengukuran dan pemetaan tanah untuk fasilitas publik; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Kelompok Sub-substansi Sengketa, Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan penyelesaian sengketa, pengaturan dan penataan pertanahan untuk fasilitas publik.

Kelompok Sub-substansi Sub-substansi Sengketa, Pengaturan dan Penataan Pertanahan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis penyelesaian sengketa, pengaturan dan penataan pertanahan untuk fasilitas publik;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penyelesaian sengketa, pengaturan dan penataan pertanahan untuk fasilitas publik;
3. pengendalian penyelesaian sengketa tanah pemerintah daerah dengan masyarakat atau pihak ketiga;
4. pengendalian pengaturan pemanfaatan tanah untuk fasilitas publik;
5. pengendalian penataan administrasi kepemilikan tanah pemerintah daerah;
6. pengendalian koordinasi teknis penyelesaian sengketa, pengaturan dan penataan pertanahan untuk fasilitas publik;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelesaian sengketa, pengaturan dan penataan pertanahan untuk fasilitas publik; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**XX. DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**

1. **Sekretariat**

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

1.1 Kelompok Sub-substansi Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
3. pengendalian administrasi keuangan;
4. pengendalian perbendaharaan;
5. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
6. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
7. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan
8. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
9. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
10. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
11. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
12. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
13. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
14. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2. Bidang Perencanaan Fasilitasi Pertanahan Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral**

Bidang Perencanaan Fasilitasi Pertanahan Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-substansi Perencanaan Transmigrasi mempunyai tugas mengendalikan penyusunan perencanaan transmigrasi.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis perencanaan transmigrasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional perencanaan transmigrasi;
3. pengendalian penyusunan perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi;
4. pengendalian penyusunan perencanaan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi;
5. pengendalian penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigran;
6. pengendalian koordinasi teknis perencanaan transmigrasi;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan transmigrasi; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Fasilitasi Pertanahan Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas mengendalikan fasilitasi pertanahan transmigrasi, energi dan sumber daya mineral sesuai kewenangan daerah.

Kelompok Sub-substansi Fasilitasi Pertanahan Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis fasilitasi pertanahan transmigrasi, energi dan sumber daya mineral sesuai kewenangan daerah;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional fasilitasi pertanahan transmigrasi, energi dan sumber daya mineral sesuai kewenangan daerah;
3. pengendalian penyusunan identifikasi potensi dan informasi pertanahan transmigrasi, energi dan sumber daya mineral;
4. pengendalian penyusunan bahan advokasi pertanahan transmigrasi, energi dan sumber daya mineral;
5. pengendalian penyiapan tanah untuk pembangunan Wilayah Pengembangan kawasan transmigrasi;
6. pengendalian penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi;
7. pengendalian penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan Kawasan Transmigrasi;
8. pengendalian penyiapan mitigasi dan penyerasian lingkungan bio fisik dan bio sosial pada kawasan transmigrasi;
9. pengendalian fasilitasi penataan, penggunaan dan pemilikan tanah transmigrasi;
10. pengendalian pengelolaan energi panas bumi sesuai kewenangan daerah;
11. pengendalian koordinasi teknis fasilitasi pertanahan transmigrasi, energi dan sumber daya mineral;
12. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi pertanahan transmigrasi, energi dan sumber daya mineral; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bidang Pembangunan, Penempatan dan Pengembangan Transmigrasi**

Bidang Pembangunan, Penempatan dan Pengembangan Transmigrasi mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

3.1 Kelompok Sub-substansi Pembangunan dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas mengendalikan pembangunan dan penempatan transmigrasi.

Kelompok Sub-substansi Pembangunan dan Penempatan Transmigrasi, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pembangunan dan penempatan transmigrasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembangunan dan penempatan transmigrasi;
3. pengendalian pembangunan kawasan tramsmigrasi;
4. pengendalian penyediaan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi;
5. pengendalian pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi;
6. pengendalian penyuluhan dan pengerahan calon transmigran;
7. pengendalian pelaksanaan pendaftaran dan seleksi pada calon transmigran;
8. pengendalian penampungan, pendataan, pemeriksaan adiministrasi, pemeriksaan kesehatan dan bimbingan mental spiritual serta pelatihan bagi calon transmigran;
9. pengendalian pengangkutan dan pengawalan calon transmigrasi dari tempat asal sampai ke daerah penempatan transmigrasi;
10. pengendalian sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) dengan wilayah sekitar;
11. pengendalian koordinasi teknis pembangunan dan penempatan transmigrasi;
12. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan penempatan transmigrasi; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-substansi Pengembangan Transmigrasi mempunyai tugas mengendalikan pengembangan transmigrasi.

Kelompok Sub-substansi Pengembangan Transmigrasi, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengembangan transmigrasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan transmigrasi;
3. pengendalian pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian;
4. pengendalian penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan Kawasan Transmigrasi;
5. pengendalian pelaksanaan promosi dan pelayanan investasi dan kemitraan masyarakat transmigrasi;
6. pengendalian pelaksanaan pengembangan kemampuan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi;
7. pengendalian pelaksanaan pengembangan kemampuan sosial budaya masyarakat transmigrasi;
8. pengendalian pemenuhan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya untuk masyarakat transmigrasi;
9. pengendalian koordinasi teknis pengembangan transmigrasi;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan transmigrasi; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
12. **Bidang Tenaga Kerja**

Bidang Tenaga Kerja mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

4.1 Kelompok Sub-substansi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Kelompok Sub-substansi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
3. pengendalian pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base instruktur dan tenaga pelatihan;
4. pengendalian pembinaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) dan Materi Ujian Kompetensi (MUK);
5. pengendalian pelaksanaan uji keterampilan/ kompetensi tenaga kerja;
6. pengendalian standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja;
7. pengendalian fasilitasi pemagangan di dalam dan di luar negeri;
8. pengendalian pelayanan rekomendasi izin lembaga pelatihan ketenagakerjaan;
9. pengendalian pelaksanaan akreditasi pemantauan status/ tingkat/jenjang kelembagaan dan perizinan lembaga pelatihan swasta dan perusahaan
10. pengendalian pembinaan produktivitas tenaga kerja
11. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
12. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Kelompok Sub-substansi Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial.

Kelompok Sub-substansi Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
3. pengendalian penyusunan sistem informasi pasar kerja dan penyebarluasan informasi pasar kerja;
4. pengendalian perizinan dan pembentukan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
5. pengendalian pembinaan lembaga dan bursa kerja dan pelayanan rekomendasi penyelenggaraan pameran bursa kerja (jobfair) kepada swasta;
6. pengendalian pembinaan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja potensial dan penyandang cacat di sektor formal dan informal;
7. pengendalian fasilitasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
8. pengendalian pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), perpanjangan Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
9. pengendalian pelayanan rekomendasi perizinan tempat penampungan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI);
10. pengendalian fasilitasi kegiatan perluasan kerja sistem padat karya dan terapan teknologi padat karya;
11. pengendalian pengawasan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran Indonesia (PMI);
12. pengendalian pembinaan hubungan industrial;
13. pengendalian fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja;
14. pengendalian penelitian dan pengesahan peraturan perusahaan;
15. pengendalian Penelitian dan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh/pekerja yang ada di perusahaan serta perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh pada perusahaan;
16. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
17. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**XXI. BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN**

**1. Sekretariat**

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

1.1 Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Badan.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
3. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
4. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
5. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
6. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
7. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja;
8. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
9. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan fungsi Penunjang yang menjadi kewenangan Badan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Badan.

Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
3. pengendalian administrasi keuangan;
4. pengendalian perbendaharaan;
5. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
6. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
7. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-substansi Infrastruktur Perhubungan dan Sumber Daya Air mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan serta perencanaan bidang infrastruktur perhubungan dan sumber daya air.

Kelompok Sub-substansi Infrastruktur Perhubungan dan Sumber Daya Air, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang infrastruktur perhubungan dan sumber daya air;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang infrastruktur perhubungan dan sumber daya air;
3. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang infrastruktur perhubungan;
4. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang sumber daya air;
5. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan bidang infrastruktur perhubungan dan sumber daya air;
6. pengendalian pengembangan inovasi daerah bidang infrastruktur perhubungan dan sumber daya air;
7. pengendalian koordinasi teknis tindak lanjut terhadap hasil kajian, penelitian dan pengembangan bidang infrastruktur perhubungan dan sumber daya air;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang infrastruktur perhubungan dan sumber daya air;
9. penyelenggaraan data dan informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang infrastruktur perhubungan dan sumber daya air;
10. penyelenggaraan koordinasi teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang infrastruktur perhubungan dan sumber daya air; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Infrastruktur Permukiman dan Perumahan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan serta perencanaan bidang infrastruktur permukiman dan perumahan.

Kelompok Sub-substansi Infrastruktur Permukiman dan Perumahan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang infrastruktur permukiman dan perumahan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang infrastruktur permukiman dan perumahan;
3. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang infrastruktur perumahan dan permukiman;
4. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan bidang infrastruktur permukiman dan perumahan;
5. pengendalian pengembangan inovasi daerah bidang infrastruktur permukiman dan perumahan;
6. pengendalian koordinasi teknis tindak lanjut terhadap hasil kajian, penelitian dan pengembangan bidang infrastruktur permukiman dan perumahan;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang infrastruktur permukiman dan perumahan;
8. penyelenggaraan data dan informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang infrastruktur permukiman dan perumahan;
9. penyelenggaraan koordinasi teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang infrastruktur permukiman dan perumahan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Kelompok Sub-substansi Pengembangan Wilayah, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Data Geospasial mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan serta perencanaan bidang pengembangan wilayah, lingkungan hidup, dan pengelolaan data geospasial.

Kelompok Sub-substansi Pengembangan Wilayah, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Data Geospasial, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pengembangan wilayah, lingkungan hidup, dan pengelolaan data geospasial;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pengembangan wilayah, lingkungan hidup, dan pengelolaan data geospasial;
3. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang pengembangan wilayah;
4. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang lingkungan hidup;
5. pengendalian pengelolaan data geospasial;
6. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan bidang pengembangan wilayah, lingkungan hidup, dan pengelolaan data geospasial;
7. pengendalian pengembangan inovasi daerah pengembangan wilayah, lingkungan hidup, dan pengelolaan data geospasial;
8. pengendalian koordinasi teknis tindak lanjut terhadap hasil kajian, penelitian dan pengembangan bidang pengembangan wilayah, lingkungan hidup, dan pengelolaan data geospasial;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pengembangan wilayah, lingkungan hidup, dan pengelolaan data geospasial;
10. penyelenggaraan data dan informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pengembangan wilayah, lingkungan hidup, dan pengelolaan data geospasial;
11. penyelenggaraan koordinasi teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pengembangan wilayah, lingkungan hidup, dan pengelolaan data geospasial; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bidang Ekonomi**

Bidang Ekonomi mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

3.1 Kelompok Sub-substansi Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan serta perencanaan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.

Kelompok Sub-substansi Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
3. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan penyuluhan;
4. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang pangan;
5. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang kelautan dan perikanan;
6. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
7. pengendalian pengembangan inovasi daerah bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
8. pengendalian koordinasi teknis tindak lanjut terhadap hasil kajian, penelitian dan pengembangan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
10. penyelenggaraan data dan informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
11. penyelenggaraan koordinasi teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-substansi Pendapatan, Penanaman Modal, Perizinan dan Kepariwisataan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan serta perencanaan bidang pendapatan, penanaman modal, perizinan dan kepariwisataan.

Kelompok Sub-substansi Pendapatan, Penanaman Modal, Perizinan dan Kepariwisataan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pendapatan, penanaman modal, perizinan dan kepariwisataan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pendapatan, penanaman modal, perizinan dan kepariwisataan;
3. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang pendapatan daerah;
4. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
5. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang kepariwisataan;
6. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan bidang pendapatan, penanaman modal, perizinan dan kepariwisataan;
7. pengendalian pengembangan inovasi daerah bidang pendapatan, penanaman modal, perizinan dan kepariwisataan;
8. pengendalian koordinasi teknis tindak lanjut terhadap hasil kajian, penelitian dan pengembangan bidang pendapatan, penanaman modal, perizinan dan kepariwisataan;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pendapatan, penanaman modal, perizinan dan kepariwisataan;
10. penyelenggaraan data dan informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pendapatan, penanaman modal, perizinan dan kepariwisataan;
11. penyelenggaraan koordinasi teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pendapatan, penanaman modal, perizinan dan kepariwisataan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3Kelompok Sub-substansi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan serta perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM, tenaga kerja, transmigrasi dan ESDM.

Kelompok Sub-substansi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM, tenaga kerja, transmigrasi dan ESDM;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM, tenaga kerja, transmigrasi dan ESDM;
3. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang perindustrian;
4. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang perdagangan;
5. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang koperasi dan UMKM;
6. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang tenaga kerja;
7. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang transmigrasi;
8. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang ESDM;
9. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM, tenaga kerja, transmigrasi dan ESDM;
10. pengendalian pengembangan inovasi daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM, tenaga kerja, transmigrasi dan ESDM;
11. pengendalian koordinasi teknis tindak lanjut terhadap hasil kajian, penelitian dan pengembangan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM, tenaga kerja, transmigrasi dan ESDM;
12. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM, tenaga kerja, transmigrasi dan ESDM;
13. penyelenggaraan data dan informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM, tenaga kerja, transmigrasi dan ESDM;
14. penyelenggaraan koordinasi teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM, tenaga kerja, transmigrasi dan ESDM; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**4. Bidang Sosial dan Budaya**

Bidang Sosial dan Budaya mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

4.1Kelompok Sub-substansi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan serta perencanaan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga.

Kelompok Sub-substansi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
3. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang pendidikan;
4. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan;
5. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang pemuda;
6. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang olah raga
7. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
8. pengendalian pengembangan inovasi daerah bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
9. pengendalian koordinasi teknis tindak lanjut terhadap hasil kajian, penelitian dan pengembangan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
11. penyelenggaraan data dan informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
12. penyelenggaraan koordinasi teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Kelompok Sub-substansi Kesehatan, KB, dan Kependudukan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan serta perencanaan bidang kesehatan, KB, dan kependudukan.

Kelompok Sub-substansi Kesehatan, KB, dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan, KB, dan kependudukan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan, KB, dan kependudukan;
3. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
4. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang kependudukan dan catatan sipil;
7. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan bidang kesehatan, KB, dan kependudukan;
8. pengendalian pengembangan inovasi daerah bidang kesehatan, KB, dan kependudukan;
9. pengendalian koordinasi teknis tindak lanjut terhadap hasil kajian, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan, KB, dan kependudukan;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan, KB, dan kependudukan;
11. penyelenggaraan data dan informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang kesehatan, KB, dan kependudukan;
12. penyelenggaraan koordinasi teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang kesehatan, KB, dan kependudukan; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3Kelompok Sub-substansi Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan serta perencanaan bidang pemerintahan, hukum, pemberdayaan masyarakat dan keagamaan.

Kelompok Sub-substansi Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, hukum, pemberdayaan masyarakat dan keagamaan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, hukum, pemberdayaan masyarakat dan keagamaan;
3. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan hukum;
4. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan bidang keagamaan;
6. pengendalian kajian, penelitian dan pengembangan terhadap program dan kegiatan bidang pemerintahan, hukum, pemberdayaan masyarakat dan keagamaan;
7. pengendalian pengembangan inovasi daerah bidang pemerintahan, hukum, pemberdayaan masyarakat dan keagamaan;
8. pengendalian koordinasi teknis tindak lanjut terhadap hasil kajian, penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, hukum, pemberdayaan masyarakat dan keagamaan;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, hukum, pemberdayaan masyarakat dan keagamaan;
10. penyelenggaraan data dan informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pemerintahan, hukum, pemberdayaan masyarakat dan keagamaan;
11. penyelenggaraan koordinasi teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pemerintahan, hukum, pemberdayaan masyarakat dan keagamaan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**5. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program**

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

5.1Kelompok Sub-substansi Perencanaan Makro mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan Makro, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional perencanaan pembangunan daerah;
3. pengendalian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
4. pengendalian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
5. pengendalian penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
6. pengendalian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
7. pengendalian pembinaan teknis sinergitas dan harmonisasi perencanaan pada perangkat daerah;
8. pengendalian koordinasi teknis perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Kelompok Sub-substansi Pengendalian mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah.

Kelompok Sub-substansi Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah;
3. pengendalian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah secara berkala, semesteran, tahunan dan lima tahun;
4. pengendalian penyusunan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah;
5. pengendalian penyusunan tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah;
6. pengendalian koordinasi teknis monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.3 Kelompok Sub-substansi Pelaporan Kinerja Pembangunan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan serta pelaporan kinerja pembangunan daerah.

Kelompok Sub-substansi Pelaporan Kinerja Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan serta pelaporan kinerja pembangunan daerah;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan serta pelaporan kinerja pembangunan daerah;
3. pengendalian pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan;
4. pengendalian analisa data dan informasi capaian program dan kegiatan pembangunan daerah;
5. pengendalian publikasi data dan informasi perencanaan pembangunan;
6. pengendalian sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
7. pengendalian pelaporan kinerja pembangunan daerah;
8. pengendalian koordinasi teknis pengembangan dan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan serta pelaporan kinerja pembangunan daerah;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan serta pelaporan kinerja pembangunan daerah; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**XXII. BADAN KEUANGAN**

1. **Sekretariat**

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

1.1 Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
3. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
4. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
5. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
6. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
7. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
8. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
9. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan fungsi Penunjang yang menjadi kewenangan Badan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
3. pengendalian administrasi keuangan;
4. pengendalian perbendaharaan;
5. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
6. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
7. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

**XXIII. BADAN PENDAPATAN**

1. **Sekretariat**

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

1.1 Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
3. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
4. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
5. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
6. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
7. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
8. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
9. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan fungsi Penunjang yang menjadi kewenangan Badan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
3. pengendalian administrasi keuangan;
4. pengendalian perbendaharaan;
5. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
6. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
7. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi;dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2. Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan**

Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-substansi Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan perhitungan dan penetapan Pajak dan Retribusi.

Kelompok Sub-substansi Perhitungan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi;
3. pengendalian pendataan subjek dan objek pajak;
4. penyelenggaraan pemeriksaan lokasi/lapangan;
5. penyelenggaraan pendaftaran wajib pajak dan pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
6. pengendalian pengelolaan dokumen perpajakan;
7. pengendalian fasilitasi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
8. pengendalian perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi;
9. pengendalian penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta nilai angsuran atas permohonan wajib pajak;
10. pengendalian koordinasi teknis perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi;
11. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bidang Penagihan I**

Bidang Penagihan I mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

3.1 Kelompok Sub-substansi Pajak Reklame, Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penagihan Pajak Reklame, Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan.

Kelompok Sub-substansi Pajak Reklame, Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penagihan Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan penagihan Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
3. pengendalian pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
4. pengendalian pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
5. pengendalian pelaksanaan penagihan Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
6. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan penagihan Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penagihan Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
8. pengendalian surat pendukung penagihan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah dan proses administrasi sita lelang; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**4. Bidang Penagihan II**

Bidang Penagihan II mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

4.1 Kelompok Sub-substansi Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kelompok Sub-substansi Pajak Bumi dan Bangunan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
3. pengendalian pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
4. pengendalian pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
5. pengendalian pengelolaan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SPPD-BPHTB);
6. pengendalian pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
7. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. pengendalian surat pendukung penagihan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah dan proses administrasi sita lelang; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**5. Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan**

Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

5.1 Kelompok Sub-substansi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah.

Kelompok Sub-substansi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi Pendapatan daerah;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;
3. pengendalian pengawasan, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;
4. pengawasan pelaksanaan penetapan dan penagihan;
5. pengawasan atas penyelesaian piutang;
6. pengendalian koordinasi teknis pengawasan, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;
7. pengendalian pengawasan, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**XXIV. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

1. **Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai**

Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

1.1 Kelompok Sub-substansi Analisis Kebutuhan dan Pengadaan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan pegawai.

Kelompok Sub-substansi Bidang Analisis Kebutuhan dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis analisis kebutuhan dan pengadaan pegawai;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional analisis kebutuhan dan pengadaan pegawai;
3. pengendalian penyusunan analisis kebutuhan pegawai;
4. pengendalian pengadaan pegawai;
5. pengendalian administrasi pengangkatan pegawai;
6. pengendalian pelaksanaan koordinasi teknis analisis kebutuhan dan pengadaan pegawai;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan pegawai; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Kelompok Sub-substansi Data dan Informasi Manajemen Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan Data dan Informasi Manajemen Kepegawaian.

Kelompok Sub-substansi Data dan Informasi Manajemen Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Data dan Informasi Manajemen Kepegawaian;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan Data dan Informasi Manajemen Kepegawaian;
3. pengendalian sistem informasi manajemen kepegawaian daerah;
4. pengendalian sistem informasi file pegawai;
5. pengendalian penyusunan Buku Induk Kepegawaian;
6. pengendalian penyusunan Daftar urut Kepangkatan;
7. pengendalian penyusunan Buku Dislokasi Jabatan;
8. pengendalian sistem informasi kinerja pegawai;
9. pengendalian koordinasi teknis updating data kepegawaian daerah;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Data dan Informasi Manajemen Kepegawaian; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Kelompok Sub-substansi Pembinaan Disiplin dan Kinerja mempunyai tugas mengendalikan administrasi pembinaan Disiplin dan Kinerja.

Kelompok Sub-substansi Pembinaan Disiplin dan Kinerja menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis administrasi pembinaan disiplin dan kinerja;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi pembinaan disiplin dan kinerja;
3. pengendalian pengelolaan sistem informasi ketaatan jam kerja PNS;
4. pengendalian administrasi pembinaan atas pelanggaran disiplin pegawai;
5. pengendalian administrasi Majelis Kode Etik PNS;
6. pengendalian administrasi sasaran kerja pegawai (SKP);
7. pengendalian administrasi penilaian kinerja PNS;
8. pengendalian administrasi pemberian penghargaan PNS berprestasi;
9. pengendalian administrasi cuti PNS;
10. pengendalian administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
11. pengendalian administrasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
12. pengendalian administrasi Pakta Integritas;
13. pengendalian koordinasi teknis administrasi pembinaan disiplin dan kinerja pegawai;
14. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan disiplin dan kinerja pegawai; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
16. **Bidang Administrasi Kepegawaian**

Bidang Administrasi Kepegawaian mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-substansi Mutasi mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan mutasi PNS.

Kelompok Sub-substansi Mutasi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan mutasi PNS;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional mutasi PNS;
3. pengendalian administrasi pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam jabatan;
4. pengendalian administrasi pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;
5. pengendalian administrasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
6. pengendalian administrasi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;
7. pengendalian administrasi perpindahan wilayah kerja PNS;
8. pengendalian administrasi penempatan dan mutasi PNS antar perangkat daerah;
9. pengendalian administrasi kenaikan gaji berkala;
10. pengendalian administrasi penyesuaian masa kerja;
11. pengendalian administrasi pemberhentian PNS;
12. pengendalian administrasi pensiun;
13. pengendalian administrasi penerbitan Kartu Pegawai, Kartu Taspen dan Kartu Istri/ Kartu Suami;
14. pengendalian administrasi pengangkatan Sumpah Pegawai Negeri Sipil;
15. pengendalian koordinasi teknis administrasi mutasi;
16. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Kepangkatan mempunyai tugas mengendalikan administrasi kepangkatan PNS.

Kelompok Sub-substansi Kepangkatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis administrasi kepangkatan PNS;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi kepangkatan PNS;
3. pengendalian administrasi kenaikan pangkat PNS;
4. pengendalian koordinasi teknis administrasi kenaikan pangkat PNS;
5. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi kepangkatan PNS; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan**

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

3.1 Kelompok Sub-substansi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan perundang-undangan.

Kelompok Sub-substansi Pendidikan dan Pelatihan, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan;
3. pengendalian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan;
4. pengendalian fasilitasi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
5. pengendalian fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
6. pengendalian pelaksanaan pelatihan atau bimbingan teknis tugas dan fungsi;
7. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-substansi Pengembangan Aparatur mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengembangan aparatur.

Kelompok Sub-substansi Pengembangan Aparatur, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengembangan aparatur;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan aparatur;
3. pengendalian fasilitasi pendidikan Izin Belajar;
4. pengendalian fasilitasi pendidikan Tugas Belajar;
5. pengendalian pelaksanaan ujian Dinas;
6. pengendalian pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
7. pengendalian penyusunan pola pengembangan karir pegawai;
8. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pengembangan pegawai;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan pegawai; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**XXV. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

1. **Sekretariat**

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

1.1 Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
3. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
4. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
5. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
6. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
7. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
8. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
9. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan fungsi Penunjang yang menjadi kewenangan Badan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
3. pengendalian administrasi keuangan;
4. pengendalian perbendaharaan;
5. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
6. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
7. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
10. **Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan**

Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-substansi Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Kelompok Sub-substansi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kesiapsiagaan bencana;
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kesiapsiagaan bencana;
3. Pengendalian fasilitasi kebijakan teknis kesiapsiagaan bencana;
4. Penyiapan bahan pemberian rekomendasi status, tingkatan bencana, koordinasi, dan kerjasama penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana;
5. Penyiapan lokasi evakuasi;
6. Pemberian dukungan, bimbingan, dan asistensi kelembagaan penanggulangan bencana;
7. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan bencana;dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Pencegahan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pencegahan bencana.

Kelompok Sub-substansi Pencegahan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kesiapsiagaan bencana;
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kesiapsiagaan bencana;
3. Pengendalian fasilitasi kebijakan teknis pencegahan bencana ;
4. Penyusunan analisis risiko bencana dan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana;
5. Pemantauan risiko bencana;
6. Penyusunan, penyampaian informasi peta risiko bencana, pencegahan, dan aksi daerah pengurangan risiko bencana;
7. Pemberian dukungan, asistensi, dan supervise pelaksanaan analisis risiko bencana terhadap kegiatan yang potensial menimbulkan bencana;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan pencegahan bencana;
9. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan bencana; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
11. **Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Bidang Kedaruratan dan Logistik mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

3.1 Kelompok Sub-substansi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kedaruratan bencana.

Kelompok Sub-substansi Kedaruratan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kedaruratan bencana;
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kedaruratan bencana;
3. Penyiapan fasilitasi kebijakan teknis kedaruratan bencana
4. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
5. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
6. Fasilitasi pemulihan sarana dan prasarana vital pada saat tanggap darurat;
7. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kedaruratan bencana;dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-substansi Logistik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan logistik penanggulangan bencana.

Kelompok Sub-substansi Logistik menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan logistik bencana;
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengelolaan logistik bencana;
3. Penyiapan fasilitasi kebijakan teknis logistik;
4. Penyelenggaraan pengelolaan logistik penanggulangan bencana;
5. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pengerahan logistik, penyediaan dan pendirian dapur umum;
6. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan logistik bencana;dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

4.1 Kelompok Sub-substansi Rehabilitasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan rehabilitasi penanggulangan bencana.

Kelompok Sub-substansi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan rehabilitasi pasca bencana;
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengelolaan rehabilitasi pasca bencana;
3. Penyiapan fasilitasi kebijakan teknis rehabilitasi;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan perbaikan lingkungan daerah bencana;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan perbaikan sarana dan prasarana umum dan pemerintahan;
6. Penyiapan bahan kerjasama penyelenggaraan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik pasca bencana;
7. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan logistik bencana; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Kelompok Sub-substansi Rekonstruksi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan rekonstruksi penanggulangan bencana daerah.

Kelompok Sub-substansi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan rekonstruksi;
2. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengelolaan rekonstruksi;
3. Penyiapan fasilitasi kebijakan rekonstruksi pasca bencana;
4. Penyiapan bahan kerjasama penyelenggaraan rekonstruksi sosial ekonomi pasca bencana
5. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan logistik bencana;
6. Pengendalian pengelolaan rekonstruksi penanggulangan bencana daerah berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**XXVI. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**1. Sekretariat**

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas:

1.1 Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pelaporan Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
3. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
4. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
5. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
6. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
7. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
8. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
9. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan fungsi Penunjang yang menjadi kewenangan Badan;dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Satuan Kerja.

Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
3. pengendalian administrasi keuangan;
4. pengendalian perbendaharaan;
5. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
6. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
7. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
10. **Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa serta Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya**

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa serta Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok Sub-substansi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa

Kelompok Sub-substansi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
3. pengendalian fasilitasi penguatan ideologi negara;
4. pengendalian fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan;
5. pengendalian fasilitasi penghayatan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
6. pengendalian pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
7. pengendalian fasilitasi rekomendasi izin penelitian dan rekomendasi izin kegiatan bagi masyarakat, organisasi dan mahasiswa;
8. pengendalian pelaksanaan pembinaan forum pembauran kebangsaan;
9. pengendalian pelaksanaan dan pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama;
10. pengendalian pelaksanaan koordinasi teknis pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
11. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Kelompok Sub-substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

Kelompok Sub-substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
3. pengendalian fasilitasi untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku dan antar umat beragama di berbagai aspek dan memantapkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya bagi segenap lapisan;
4. pengendalian fasilitasi dan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba;
5. pengendalian fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, seminar, diskusi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
6. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
9. **Bidang Politik Dalam Negeri**

Bidang Politik Dalam Negeri mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

3.1 Kelompok Sub-substansi Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengembangan budaya dan etika politik.

Kelompok Sub-substansi Pengembangan Budaya dan Etika Politik menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan budaya dan etika politik;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengembangan budaya dan etika politik;
3. pengendalian pelaksanaan sosialisasi kebijakan politik nasional;
4. pengendalian fasilitasi pelaksanaan diskusi politik;
5. pengendalian fasilitasi HAM dalam budaya dan etika politik;
6. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pengembangan budaya dan etika politik;
7. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan budaya dan etika politik; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kelompok Sub-substansi Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.

Kelompok Sub-substansi Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;
3. pengendalian fasilitasi sosialisasi administrasi bantuan partai politik;
4. pengendalian verifikasi perihal bantuan partai politik;
5. pengendalian penyusunan database partai politik;
6. pengendalian pengelolaan laporan pertanggungjawaban bantuan partai politik;
7. pengendalian fasilitasi serta evaluasi persiapan pelaksanaan pemilu;
8. pengendalian fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan Pemilu;
9. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;
10. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi Partai Politik dan Pemilu; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
12. **Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional**

Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mengkoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri atas :

4.1Kelompok Sub-substansi Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.

Kelompok Sub-substansi Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;
3. pengendalian fasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan organisasi nirlaba lainnya;
4. pengendalian penyusunan database organisasi kemasyarakatan;
5. pengendalian fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan mutu organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan organisasi nirlaba lainnya;
6. pengendalian peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan organisasi nirlaba lainnya dalam pembinaan kesatuan bangsa;
7. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;
8. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2Kelompok Sub-substansi Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.

Kelompok Sub-substansi Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
3. pengendalian fasilitasi pemantapan serta kerjasama Intelijen (Komunitas Intelijen Daerah);
4. pengendalian fasilitasi pelaksanaan pemantauan, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
5. pengendalian fasilitasi penanganan solidaritas sosial masyarakat;
6. pengendalian pengembangan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik di masyarakat;
7. pengendalian fasilitasi rekonsiliasi konflik Sosial;
8. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
9. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**BAB II**

**TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
2. Koordinator sebagaimana dimaksud pada angka romawi I memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
3. Dalam menjalankan tugasnya, Koordinator dapat dibantu oleh Sub-koordinator.
4. Sub-koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok Sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
5. Jangka waktu penugasan sebagai Koordinator dan Sub-koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
6. Penugasan Koordinator dan Sub-koordinator ditetapkan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing melalui Surat Tugas.

FORMAT SURAT TUGAS

KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

|  |  |
| --- | --- |
| KOP SURAT    **SURAT TUGAS**  NOMOR: ……………………. | |
| Dasar :  Kepada : | 1. bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi jabatan fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub-Koordinator; 2. bahwa berdasarkan angka VI Bab II Lampiran Keputusan Bupati Nomor…. Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menugaskan pegawai sebagaimana tersebut dalam Surat Tugas ini untuk melaksanakan tugas sebagai …….. (*diisi salah satu sebagai Koordinator atau Sub-koordinator*);   **Menugaskan;**   |  |  | | --- | --- | | Nama  NIP  Jabatan | : ………….. (*diisi nama ybs*)  : ………….. (*diisi nama ybs*)  : ………….. (*diisi Jabatan Fungsional ybs)* | |
| Untuk : | 1. Diberikan tugas tambahan sebagai ……. (*diisi Koordinator Substansi* ……… *atau Sub-Koordinator Sub-substansi* ……) Terhitung Mulai Tanggal ………. 2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Akumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit. 3. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab   …………, …………………….20..  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  ………………………………………….  NIP. …………………………………… |

**BAB III**

**KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR**

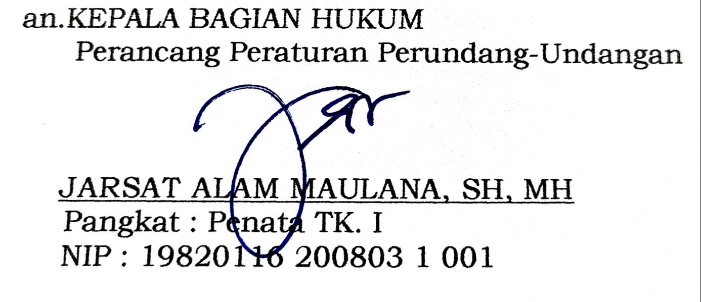
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Koordinator dan Sub-koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli madya.
3. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
4. Dalam hal tidak dilaksanakan Penyetaraan Jabatan pada jenjang Jabatan Administrator maka fungsi Koordinator dilaksanakan oleh Pejabat Administrator di atas Sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
5. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II maka pejabat fungsional dengan jenjang paling rendah ahli muda hasil penyetaraan jabatan maupun bukan hasil penyetaraan dapat diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator jabatan fungsional.
6. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka romawi III, maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator jabatan fungsional.
7. Pelaksanaan tugas sebagai Koordinator dan Sub-koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/ atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/ atau berat.
8. Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub-koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub-koordinator paling kurang 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 30 Desember 2021

an.KEPALA BAGIAN HUKUM

Perancang Peraturan Perundang-Undangan

**JARSAT ALAM MAULANA, SH, MH**

Pangkat: Penata TK. I

NIP : 19820116 200803 1 001